

**PELEMBAGAAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2014-2019**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Fachri Setiadi (1506016014)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2019

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada,
Yth. Ibu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara/i:

Nama : FACHRI SETIADI

NIM : 1506016014

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Kendal Tahun 2014-2019

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 12 November 2019

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi



Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag

NIP: 197303142001121001

Tanggal : 20/11/2019

Bidang Metodologi & Tata Tulis



Solikhah Mufrakhah, M.Si

NIP:

Tanggal : 20/11/2019

SKRIPSI
PELEMBAGAAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2014-2019

Disusun oleh :
Fachri Setiadi
1506016014

Telah dipertahankan di depan majlis penguji skripsi pada tanggal 17
Desember 2019 dan dinyatakan LULUS.

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
NIP. 19780930 200312 1 001

Sekretaris



Solkhah Mufrikhah, M.Si
NIP.

Penguji I



Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP. 19680505 199503 1 002



Penguji II



Muhammad Mahsun, M.A
NIP.

Pembimbing I

Bidang Substansi Materi



Dr. Muhyar Fanani, M.Ag
NIP. 197303142001121001

Pembimbing II

Bidang Metodologi & Tata Tulis



Solkhah Mufrikhah, M.Si
NIP.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 20 November 2019



Eachri Setiadi
NIM: 1506016014

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelebagaan Partai Kebangkitan Bangsa Di Kabupaten Kendal Tahun 2014-2019”**. Selawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada pemimpin umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, berpengetahuan dan berintelektual.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik S1 (S.Sos) pada Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan morel maupun material baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh

terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.

2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. H. Adib, M.Si dan Muhammad Mahsun, M.A selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberi berbagai pengarahan dan nasehat khususnya dalam hal pelaksanaan perkuliahan.
4. Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag dan Solkhah Mufrikah, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan tulus telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag selaku wali dosen yang telah memberikan pengarahan dan nasihat selama ini.
6. Bapak Ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan pengalamannya sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan sangat berguna.
7. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

8. Ketua DPC PKB Kabupaten Kendal yang telah mengizinkan dan menerima penulis dengan baik untuk melakukan penelitian, sehingga penulis memperoleh data-data yang dapat mendukung dalam penulisan skripsi ini.
9. Para kader atau anggota PKB Kabupaten Kendal yang telah rela meluangkan waktu untuk wawancara.
10. Teristimewa kedua orang tua saya Ibu Misdalintun dan Bapak Asmadi yang telah mencurahkan cinta, kasih sayang, do'a, kesabaran, semangat, nasihat, motivasi, pengorbanan baik dari segi morel, maupun material kepada penulis tiada henti dan tiada lelah sampai pada saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah.
11. Masyarakat Prisilan Wismasari Ngaliyan Semarang yang telah mengizinkan tinggal di musala Nurul Imam dalam menempuh perjuangan kuliah di Semarang ini.
12. Terima kasih Bapak Kyai Imam Turmudzi. S.Pd.I. yang telah memberikan doa, ilmu agama dan nasihat yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.
13. Saudara sepupu dan ponakan penulis tersayang, Dina, Meme, Sasa, Angel, Rafa, Hijrah, terimakasih untuk doa dan semangat kepada penulis, kalian yang selalu membuat penulis tersenyum dan termotivasi hingga bisa menyelesaikan studi ini.

14. Sahabat seperjuangan Musala Nurul Imam. Yudha Mamduh, Misbahul, Saiful, Bagas Purba Dhika, Taufiqul Umam, Ikhsan, Rizal. Kalian adalah yang selalu memberikan semangat, memotivasi. Semoga kedepannya kita semua sukses. Aaamiin.
15. Sedulur Karangturi di Desa Gemuhblanten yang sudah memberikan pengaruh untuk selalu memberi semangat dalam pemuatan karya ilmiah ini
16. KPU Kabupaten Kendal yang menerima serta membantu dalam pengumpulan data.
17. Sahabat seperjuangan “Ilmu Politik 2015” Afief Zaenul Haq, Rudi Fakrudin, Fadlilatunnaja, Sulaiman Iyalullah, Aghisna, Ifa, Bukhoree, Rizki Abdillah, dan teman-teman yang lain, terima kasih kalian yang selalu membuat penulis tertawa, termotivasi. Semoga persahabatan ini selalu terjalin sampai tua nanti. Amiiin
18. Buat teman-teman baru yang terasa seperti keluarga sendiri: Saudara-saudara KKN posko 94 Desa Wonorejo Kabupaten Demak, Mustofa, Ageng, Mail, Ida, Dewi, Winda, Jumiah, Salma, Afina, Alfi, Urfi. Semoga Persaudaraan ini tidak berhenti disini, tapi hingga kita tua kelak.
19. Teman-teman seperjuangan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2015, terima kasih untuk kalian yang selalu memberikan semangat serta dorongan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.

20. Teman teman organisasi, BEM FISIP 2016, LPM REFERENCE, WSC, FSC dan GmnI, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah penulis anggap sebagai keluarga, sudah mau berproses, belajar bersama dan berbagi pengalaman yang luar biasa, sehingga penulis bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman dari masing-masing organisasi yang penulis ikuti.
21. Serta, semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, penulis haturkan terima kasih.

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, penulis mengucapkan terima kasih dan memanjatkan doa semoga apa yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang lebih baik dan diterima sebagai amal sholeh. Meskipun dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin, namun tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 November 2019

Fachri Setiadi
Nim 1506016014

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta **Ayahanda Asmadi** dan **Ibunda Misdalinatun** yang telah menyemangatiku, membesarkanku, mendidikku, menuntun setiap langkahku, dan senantiasa selalu berdoa untuk kesuksesanku

Almamaterku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang

MOTTO

**“JIKA KITA MEMPUNYAI KEINGINAN YANG KUAT DARI HATI,
MAKA SELURUH ALAM SEMESTA AKAN BAHU MEMBAHU
MEWUJUDKANNYA”**

-Ir. Soerkarno-

ABSTRAK

Partai politik adalah pilar utama kehidupan demokrasi. Partai politik menjadi parameter perpolitikan di Indonesia. Sebuah partai yang pelembaannya baik akan memberikan dampak positif bagi perpolitikan. Karena proses pelembaan dari roda partai yang berjalan sesuai kesepakatan yang disepakati bersama. Proses pelembaan tidak hanya berbicara tentang internal partai saja, didalam proses pelembaan ada beberapa yang perlu diamati. Dari proses pemantapan structural partai politik hingga dalam sisi kultural.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan naratif, dengan tujuan untuk meneliti kehidupan individu-individu dan meminta seseorang atau kelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Kemudian informasi yang didapat, diceritakan kembali oleh peneliti dalam bentuk kronologi naratif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi langsung, wawancara mendalam, dokumentasi dan analisis data.

Hasil penelitian bahwa dari sisi pelembaan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal sudah bisa membangun pelembaan dengan baik pada pemilu 2019, diukur dari teori pelembaan partai politik Randall dan Svavand. Berikut beberapa hasil keberhasilan dan kegagalan partai dalam membangun kelembagaan. Pertama, dalam demokrasi partai, Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal selalu mengedepankan musyawarah mufakat. Kedua, selalu mengedepankan platform partai. Ketiga selalu bersinergi dengan organisasi sayap dan basis dukungan. Keempat, Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal secara kelembagaan sampai saat ini memiliki basis yang kuat. Kelima, pelembaan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal terdapat kekurangan pada proses pendanaan yang tidak berjalan dengan baik.

Studi ini memberikan gambaran bahwa untuk melihat kemampuan partai, tidak hanya dapat dilihat pada level nasional. Karena, peran partai di daerah akan menentukan keberhasilan partai di akar permukiman. Dengan partai politik tingkat lokal harus menjalankan tugasnya dengan mengemukakan platformnya serta menjalankan kaidah kaidah konsitusen sehingga partai bisa berjalan dengan baik.

Kata Kunci: *Partai politik, Pelembaan partai, Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal.*

ABSTRACT

Political parties are the main pillars of democracy. Political party is a parameter of political condition in Indonesia. A party which a good institutionalization will have a positive impact on politics it self. Because of the institutionalization process of the party's wheels run according to the mutually agreed agreements. The institutionalization process does not only talk about internal parties, in the institutionalization process there are some aspects that need to be observed. From the structural stabilization process of political parties to the cultural side.

This research is a qualitative study using a narrative approach, with the aim of investigating the live of individuals and asking individuals or groups of individuals to tell their lives. Then the researcher retold the information obtained by narrative chronology. The data collection technique in this study using direct observation techniques, in-depth interviews, documentation and data analysis.

The results of this study is in terms of institutionalization of the National Awakening Party of Kendal Regency were able to establish institutionalization well in the 2019 election, measured from the theory of the institutionalization of political parties by Randall and Svavand. Here are some results of the successes and failures of this party in building institutions. First, in party democracy, Kendal Regency National Awakening Party always puts forward consensus agreement. Second, always put forward the party platform. Third always synergize with wing organizations and support bases. Fourth, the Kendal Regency National Awakening Party as an institution has a strong basis. Fifth, the institutionalization of the Kendal Regency National Awakening Party (PKB) is lacking in the funding process which is not going well.

This study provides an illustration that to see the establishment of the party, not only can be seen at the national level. Because, the role of parties in the local district will determine the success of the party at the root surface. With local level political parties, they must carry out their duties by taking root in their platforms and implementing the rules of the constituents so that the parties can run well.

Keywords: *Political parties, Party institutionalization, The National Awakening Party of Kendal*

مُسْتَخْلَصُ الْبَحْثِ

للسياسة معلمة السياسية الأحزاب تعتبر الديمقراطية للحياة الأساسية الركائز هي السياسية الأحزاب عملية لأن السياسة على إيجابي تأثير له سيكون جيدة مؤسسته تكون الذي الحزب .إندونيسيا في لا متبادل بشكل عليها المتفق للاتفاقيات وفقاً تعمل الحزب عجلات على المؤسسي الطابع إضفاء المؤسسي الطابع إضفاء عملية في ، الداخلية الأحزاب عن فقط المؤسسي الطابع إضفاء عملية تحدث الثقافي الجانب إلى السياسية للأحزاب الهيكلية الاستقرار عملية من .مراعاتها يجب التي بعض هناك ومطالبة الأفراد حياة في التحقيق بهدف ، سردياً منهجاً تستخدم نوعية دراسة عن عبارة البحث هذا سردها وإعادة ، عليها الحصول تم التي المعلومات ثم .حياتهم بتوضيح الأفراد مجموعات أو الأفراد تقنيات الدراسة هذه في البيانات جمع يستخدم .السرد الزمني التسلسل شكل في الباحثين قبل من فيما أنه الدراسة نتائج أظهرت .البيانات وتحليل والوثائق المتعمقة والمقابلات المباشرة الملاحظة تأسيس من تمكنت ، ريجنسي كيندال في الوطني الصحة حزب على المؤسسي الطابع بإضفاء يتعلق الأحزاب على المؤسسي الطابع إضفاء نظرية من مقاسة ، ٢٠١٩ انتخابات في جيد بشكل المؤسسات ، أولاً .المؤسسات بناء في الأحزاب وفشل نجاحات نتائج بعض يلي فيما .وسفافاند راندال السياسية دائماً ، ثانياً دائماً اتفاقاً ريجنسي كيندال في الوطنية الصحة حزب يطرح ، الحزبية الديمقراطية في الصحة حزب ، رابعا .الدعم وقواعد الجناح المنظمات مع التعاون دائماً الثالث .الحزب منصة طرح كيندال حزب إيقاظ عملية تفتقر ، خامساً .قوي أساس لديه كمؤسسة ريجنسي كيندال في الوطنية مثلاً الدراسة هذه تقدم .يرام ما على تسير لا التي التمويل عملية إلى الوطني الصحة ريجنسي لأن .الحزب تأسيس رؤية أجل من إلا الوطني المستوى على الحزب هذا رؤية يمكن لا أنه يوضح على السياسية الأحزاب مع .الجزر سطح على الحزب نجاح سيحدد المنطقة في الأطراف دور قواعد وتنفيذ برامجهم في جذورهم ترسيخ خلال من بواجباتهم القيام عليهم يجب ، المحلي المستوى جيد بشكل تعمل أن للأحزاب يمكن بحيث الناخبين

الصحة حزب ، الحزب على المؤسسي الطابع إضفاء ، السياسية الأحزاب : الأساسية الكلمات ريجنسي كيندال في الوطنية

DAFTAR ISI

COVER.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoretis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Teori.....	11
1. Partai Politik	12
2. Pelembagaan Partai Politik	14

G.	Metode Penelitian.....	20
1.	Jenis dan pendekatan penelitian kualitatif.....	20
2.	Sumber dan jenis data.....	21
3.	Teknik pengumpulan data.....	22
H.	Sistematika Penulisan Skripsi.....	26
BAB II Gambaran Umum Lokasi Penelitian		
A.	Profil Kabupaten Kendal	28
1.	Wilayah Kabupaten Kendal	28
2.	Kondisi Demografi	29
B.	Gambaran Umum Fokus Penelitian.....	34
1.	Partai Kebangkitan Bangsa.....	34
2.	Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal.....	49
BAB III Dinamika Partai Kebangkitan Bangsa		
1.	Partai Kebangkitan Bangsa dan Pemilu di Indonesia.....	54
2.	Dinamika Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal....	59
BAB IV Deskripsi dan Analisis Data		
A.	Derajat Kesisteman (<i>Systemness</i>)	62
1.	Demokrasi internal	62
2.	Keutuhan Organisasi.....	65
3.	Keanggotaan dan Kaderisasi.....	68
B.	Derajat Penanaman Nilai (<i>Value Infusion</i>)	72
1.	Basis dukungan partai.....	72
2.	Kuatnya Ideologi dan rendahnya klientalisme di parta	75

C.	Derajat Otonomi	78
1.	Keuangan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal	78
2.	Kemandirian partai dalam pengambilan keputusan ..	80
D.	Derajat Pengetahuan Publik (<i>Reification</i>).....	82
1.	Kiprah Partai Dalam Politik Lokal	83
2.	Kiprah Partai di Masyarakat	86
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	92
B.	Saran	95
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Dimensi pelembagaan partai politik versi Randall dan svasand	15
Tabel 2 Hasil Pemilu Legislatif 2009-2019 Kab Kendal	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kabupaten Kendal.....	28
Gambar 2 Logo Partai Kebangkitan Bangsa.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik merupakan sebuah pilar demokrasi. Dalam negara partai politik menjadi pusat rekrutmen dan sirkulasi elit politik. Partai politik juga merupakan sarana komunikasi bagi rakyat untuk memperjuangkan hak masyarakat. Partai politik merupakan kelompok yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama (Budiardjo, 2008:404). Tujuan partai memperoleh kekuasaan politik demi memperjuangkan hak yang mereka perjuangkan kepada masyarakat.

Dalam peran dan fungsinya partai politik menurut firmanzah memiliki dua garis besar (Efriza, 2012:226). Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini partai sebagai peran penting dalam pembinaan, pendidikan politik atau edukasi, pebekalan, kaderisasi dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latarbelakang pendirian parpol. Kedua, parpol juga bersifat eksternal organisasi. Peran dan fungsi kedua sebagai organisasi yang terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik memiliki tanggungjawab konstitusional, moral dan etika untuk membawa aspirasi, kondisi dan situasi masyarakat lebih baik.

Pelebagaan partai politik menjadi arah tujuan penelitian penulis. Dalam berebapa pengertian pelembagaan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk mengukur tingkat kematangan demokrasi. Ada dua pengaruh pelembagaan yang dapat menimbulkan melemahnya rezim demokrasi (Richard dan William 2015: 360). Pertama pelembagaan yang lemah menimbulkan ketidakpastian yang lebih besar mengenai hasil pemilu dan dapat melemahkan rezim demokratis. Kedua, pelembagaan yang lemah bertentangan dengan akuntabilitas pemilu.

Pelebagaan partai politik sebuah kebutuhan di negara demokrasi yang tidak dapat ditawar. Partai adalah bagian yang paling penting dalam demokrasi, sehingga pelembagaan kepartaian menjadikan partai politik bekerja dalam koridor fungsi-fungsinya. Secara umum pelembagaan ialah proses melembagakan dukungan massa, dimana partai politik itu sendiri yang akan menjadi kuat selama ia mampu mengorganisasikan dukungan massa.

Ilmuan politik yaitu Randall dan Svasand mengartikan pelembagaan partai politik adalah "*The process by wich the party becames established in terms of both intergeted patterns on behavior and attitudes and culture*". Artinya bahwa pelembagaan partai politik ialah proses pemantapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku, selain itu dalam

sisi kultural partai politik mempolakan sikap dan budaya (Randall dan Svasand, 2002:12).

Dari pengertian partai politik Randall dan Svasand (2002:13) mereka berdua menggabungkan teori dari beberapa ahli, sehingga muncul beberapa pengukuran sebuah pelebagaan organisasi partai politik. Pertama derajat kesisteman, kedua identitas partai, ketiga ada otonomi, ke empat reifikasi. Ke empat unsur tersebut saling bertemu dalam persilangan aspek internal-eksternal dan apsek struktural-kultural. Jika suatu parpol bisa mengelola ke-empat unsur tersebut dengan baik, maka parpol dapat dikatakan mengalami pelebagaan yang optimal (Efriza, 2012:240).

Peneliti akan menggunakan teori ini dalam penelitian. Teori ini banyak digunakan dari penelitian penelitian sebelumnya, sehingga peneliti menggunakan teori ini. Tidak hanya meninjau dari penelitian sebelumnya peneliti juga membaca teori-teori dari beberapa ilmuan untuk membandingkan teori mana yang akan digunakan. Teori Randall dan Svasand lebih spesifik dalam hal pelebagaan partai politik, sehingga peneliti menggunakan teori ini.

Penulis fokus dalam penelitian pelebagaan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal pada tahun 2014-2019. Pendapatan suara daerah akan mempengaruhi tingkat nasional, saling berhubungan serta saling bersinergi. Partai politik di daerah lokal menjadi hal penting untuk mengakarkan ideologi partai di

dalam masyarakat. Dengan demikian partai bisa lebih leluasa dalam menyebarkan ideologinya dan program programnya. Kegagalan pelebagaan suatu partai akan berdampak dalam perolehan suara baik lokal maupun daerah. Jika mana tingkat lokal pelebagaan tidak berjalan dengan semestinya maka akan menjadi kemunduran dalam perolehan suara dan kepercayaan masyarakat. Maka sebaliknya pelebagaan yang dijalankan dengan baik serta kompeten di suatu partai, partai itu akan mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat dan tentunya akan menambah legitimasi masyarakat.

Uraian di atas menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten Kendal. Penulis memfokuskan untuk melihat tingkat pelebagaan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal dengan mengacu beberapa alasan. Pertama, Partai Kebangkitan Bangsa berhasil mendapatkan kursi legislatif seimbang dengan PDIP dan berhasil juga memperoleh suara terbanyak di Kabupeten Kendal.

Kedua, Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai Islam yang berkembang sampai memperoleh suara terbanyak pada pemilu 2019 di Kabupaten Kendal. Sebelumnya pada pemilu legislatif tahun 2009 Partai Kebangkitan Bangsa hanya bisa memperoleh suara 13.74% berada di bawah partai Golkar dan PDIP. Sementara pada pemilu legislatif pada tahun 2014 mendapatkan suara 15.35%, serta menjadi partai nomer dua setelah PDIP dalam perolehan suara di Kendal. Kemudian pada

pemilu tahun 2019 Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal mendapatkan suara terbanyak yaitu 19.99%. Peningkatan perolehan suara dari tahun 2009 sampai tahun 2019 menjadikan penulis tertarik untuk meneliti pelebagaan partai ini dengan judul “*Pelebagaan PKB di Kabupaten Kendal Tahun 2014-2019*”. Tidak hanya mengkaji tentang pelebagaannya saja peneliti ingin juga mengetahui tentang tantangan dan hambatan-hambatan “*Pelebagaan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Kendal Tahun 2014-2019*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana pelebagaan PKB di Kabupaten Kendal pada tahun 2014-2019?
2. Apa tantangan dan hambatan-hambatan pelebagaan PKB di Kabupaten Kendal Tahun 2014-2019?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelebagaan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Kendal 2014-2019

2. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan tentang pelebagaan yang dihadapi Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Kendal

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk teori-teori mengenai pelebagaan partai politik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi mahasiswa dapat mengenalkan teori pelebagaan partai politik serta memberikan gambaran penerapannya dalam pelebagaan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Kendal.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis merujuk pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Lutfi, Muhammad. 2012. Tesis yang berjudul *Pelebagaan Partai Politik di Tingkat Lokal(Studi tentang pelebagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada pemilu 2009)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelebagaan Partai Golkar di

Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada Pemilu 2009 serta mengungkap kendala kendala yang dihadapi Partai Golkar di Kabupaten Sinjai dalam proses pelebagaan partainya. Hasil penelitian partai Golkar belum berhasil membangun pelebagaan yang baik di kabupaten sinjai. Kesamaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang peneliti ajukan adalah terletak pada teori pelebagaan partai politik. Sedangkan perbedaan penelitian dengan peneliti ajukan dengan peneliti terdahulu adalah Tingkat pelebagaan PKB di Kabupaten Kendal. Berdasarkan perbedaan tersebut bahwa kajian yang akan diteliti berbeda dengan penulis, karena penulisan skripsi ini mengambil permasalahan tentang pelebagaan PKB di Kabupaten Kendal. Sehingga dapat dinyatakan bahwa penulisan ini dengan judul “Pelebagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Kendal Tahun 2014-2019” berbeda dengan penulisan skripsi terdahulu tersebut.

2. Hijriyah Y. 2013. Skripsi yang berjudul *Institusionalisasi Partai Nasdem di Kabupaten Gowa*. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui upaya dilakukan Partai NasDem dalam memperluas jaringan politiknya di Kabupaten Gowa. Kesamaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang peneliti ajukan adalah terletak pada teori pelebagaan partai yang yang digunakan.

Sedangkan perbedaan penelitian dengan peneliti ajukan dengan objek penelitian terdahulu adalah partai Nasdem masih mencari jaringan untuk memperluas jaringan dan sementara partai PKB di Kendal sudah berdiri lebih dari sepuluh tahun keatas. Berdasarkan perbedaan tersebut bahwa kajian yang akan diteliti berbeda dengan penulis, karena penulisan skripsi ini mengambil permasalahan tentang pelebagaan sebelum pemilu dan pengaruh pelebagaan dalam suara partai. Sehingga dapat dinyatakan bahwa penulisan ini dengan judul “*Pelebagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Kendal Tahun 2014-2019*” berbeda dengan penulisan skripsi terdahulu tersebut.

3. Rowdotusya'adah. 2018. Skripsi yang berjudul *Pelebagaan Partai Politik dan Faksi Intra-Partai (Studi tentang Kemunculan Faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kemunculan Faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat. Kesamaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang peneliti ajukan adalah terletak pada teori pelebagaan partai yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian dengan peneliti ajukan adalah peneliti dahulu berfokus dalam pengaruh kemunculan faksi baru didalam sebuah partai. Berdasarkan perbedaan tersebut bahwa kajian yang akan

diteliti berbeda dengan penulis, karena penulisan skripsi ini mengambil permasalahan tentang pelebagaan sebelum pemilu dan pengaruh pelebagaan dalam suara partai. Sehingga dapat dinyatakan bahwa penulisan ini dengan judul “*Pelebagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Kendal Tahun 2014-2019*” berbeda dengan penulisan skripsi terdahulu tersebut.

4. Ekawati, Esty. 2016. Penelitian yang berjudul *Institusionalisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Pemilihan Umum 2009*. Hasil penelitian mengetahui peningkatan hasil perolehan suara nasional PKB melalui membenahi struktur dan konduktivitas partai serta kemampuan pemimpin dalam mengelola faksi-faksi berdampak baik dalam pelebagaan partai politik. Kesamaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang peneliti ajukan adalah terletak pada pelebagaan partai politik. Sedangkan perbedaan penelitian dengan peneliti ajukan adalah analisis pengaruh pelebagaan dalam naiknya suara partai PKB di Kabupaten Kendal. Berdasarkan perbedaan tersebut bahwa kajian yang akan diteliti berbeda dengan penulis, karena penulisan skripsi ini mengambil permasalahan tentang pelebagaan PKB di Kabupaten Kendal. Sehingga dapat dinyatakan bahwa penulisan ini dengan judul “*Pelebagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)*

di Kabupaten Kendal Tahun 2014-2019” berbeda dengan penulisan penelitian terdahulu tersebut.

5. Natsir, Nurlatipah. 2016. Penelitian yang berjudul *Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan Partai Dengan Konstituen*. Hasil penelitian mengetahui hubungan partai dengan konstitusi dengan menggunakan perspektif kelembagaan partai. Kesamaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang peneliti ajukan adalah terletak pada pelebagaan partai politik. Sedangkan perbedaan penelitian dengan peneliti ajukan adalah analisis pengaruh pelebagaan dalam naiknya suara partai PKB di Kabupaten Kendal. Berdasarkan perbedaan tersebut bahwa kajian yang akan diteliti berbeda dengan penulis, karena penulisan skripsi ini mengambil permasalahan tentang pelebagaan PKB di Kabupaten Kendal. Sehingga dapat dinyatakan bahwa penulisan ini dengan judul “*Pelebagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Kendal Tahun 2014-2019*” berbeda dengan penulisan penelitian terdahulu tersebut.
6. Wahid, Makmun. 2017. Penelitian yang berjudul *Penguatan Pelebagaan Partai Politik Melalui Pilkada Serentak 2018: Sebagai Upaya Melahirkan Elit Politik Yang Etis*. Hasil penelitian ini menggambarkan

kurangnya pelebagaan partai politik di Indonesia. Kesamaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang peneliti ajukan adalah terletak pada teori pelebagaan partai politik. Sedangkan perbedaan penelitian dengan peneliti ajukan adalah objek pada objek peneliti terdahulu adalah analisis pengaruh pelebagaan dalam naiknya suara partai PKB di Kabupaten Kendal. Berdasarkan perbedaan tersebut bahwa kajian yang akan diteliti berbeda dengan penulis, karena penulisan skripsi ini mengambil permasalahan tentang pelebagaan PKB di Kabupaten Kendal. Sehingga dapat dinyatakan bahwa penulisan ini dengan judul “*Pelebagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Kendal Tahun 2014-2019*” berbeda dengan penulisan penelitian terdahulu tersebut.

F. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun kerangka teori sebagai kerangka analisis, untuk menentukan sudut pandang masalah terhadap objek yang telah dipilih (Hadari, 1987: 40). Untuk mengkaji lebih dalam terkait pelebagaan PKB di Kabupaten Kendal Tahun 2014-2019. Pertama penulis akan memberikan gambaran tentang konsep partai poltik, kemudian penulis

menggunakan teori pelebagaan partai politik dari Vicky Randall dan Lars Svasand (2002:12).

1. Partai Politik

Partai berasal dari bahasa latin Maurice Duveger menyebutkan “*partire*”, yang bermakna membagi (Labolo & Ilham, 2015:9). Dengan demikian dari pengertian tersebut kita bisa memaknai bahwa partai merupakan sebuah bagian maka ada bagian bagian lainnya. Partai merupakan bagian paling penting disebuah negara demokrasi. Meskipun awal dari kehadiran partai banyak yang menilai negatif. Robespierre orator agigator revolusi Perancis menyatakan partai politik hanyalah organisasi yang hanya mementingkan kepentingan pimpinan” (Efriza, 2012:213).

Partai politik merupakan sebuah cerminan negara yang demokratis. Clinton Rossiter dalam buku sampil Richard & William (2014) menyebutkan bahwa “Tidak ada demokrasi tanpa politik, tidak ada politik tanpa partai”. Pada hakikatnya suatu negara yang partai politik adalah bentuk manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sosial sesuai dengan kepentingan masyarakat. Keberadaan partai juga dapat dilihat sebagai bentuk kebebasan hak asasi manusia, karena partai bentuk suatu kebebasan berserikat dan hidup berorganisasi. Richard H. Pildes dalam Labolo dan Ilham (2015:8) mengatakan bahwa tanpa adanya kemerdekaan berserikat, hak asasi manusia

dapat berkurang karena dalam diri seseorang tidak dapat menyatakan kebebasan pendapat.

Dalam perjalanan waktu kehadiran partai dalam sistem demokrasi modern dianggap bagian paling penting dari demokrasi modern. Untuk memahani lebih lanjut tentang pengertian partai politik berikut definisi partai politik menurut para ilmu politik:

Edmund Burke (1770) dalam Richard dan William (2014:4) mendefinisikan partai politik kumpulan orang yang bersatu untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui usaha bersama, mereka berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang mereka sepakati bersama.

Schlesinger (1991) dalam Richard dan William (2014:5) mendefinisikan partai politik kelompok yang terorganisir untuk mendapatkan kontrol pemerintahan atas nama kelompok itu dengan memenangi pemilihan-pemilihan jabatan publik Dalam definisi ini partai politik menjadi kendaraan untuk mencapai kekuasaan atau jabatan jabatan tertentu.

Meriam Budiardjo mendefinisikan partai politik ialah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama (Budiardjo, 2008:404). Berbeda dengan organisasi-organisasi lain partai politik mengikuti pemilu untuk mendapatkan menduduki jabatan kekuasaan politik dan merebut kekuasaan

politik serta hingga mempertahankan kekuasaan yang sudah diperoleh.

Sartori dalam Budiarto (2008:404) mendefinisikan partai politik suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (A party is any political group that present at election, and is capable of placing through elections candidates for public office).

Berdasarkan pengertian diatas, kita dapat simpulkan partai politik ialah organisasi politik resmi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dengan tujuan untuk menguasai atau merebut pemerintahan. Untuk dapat meraih tujuan tersebut partai menempatkan anggotanya dalam pemerintahan melalui pemilihan umum. Sementara secara umum partai politik mempunyai fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik, kontrol politik (Surbhakti, 2010:149-155).

2. Pelembagaan Partai Politik

Dalam konsep mengenai pelembagaan partai politik telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah konsepsi pelembagaan partai politik yang dikemukakan oleh Vicky Randall dan Lars Svasand. Menurut

Randall dan Svasand (2002:12) pelebagaan partai politik suatu proses pemantapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam rangka mempolakan sikap atau budaya (*The process by wich the party becames established in term of both integrated patterns on behavior and of attitudes and culture*).

Tabel 2

Dimensi pelebagaan partai politik versi Randall dan svasand

	Internal	Eksternal
Struktural	Kesisteman	Otonomi
Ke-sika-pan	Identitas Nilai	Citra Publik

Sumber: Randall dan Svasand 2002

Dalam tabel diatas Randall dan Svasand (2002:13) membagi proses dua aspek pelebagaan partai politik. Pertama aspek internal-eskternal dan aspek strutural-kultural. Kemudian kedua aspek disilangkan, hasil persilangan pertama antara aspek internal dan struktural disebut kesisteman (*systemness*). Kedua, persilangan aspek internal dan kultural yaitu identitas nilai (*value infusuion*). Ketiga persilangan antara aspek eksternal dan struktural yaitu otonomi (*decisional autonomy*). Keempat, persilangan antara aspek eksternal dan kultural menghasilkan citra publik (*reification*). Dari beberapa persilangan tersebut mengasilkkan 4 aspek yang akan dibahas dibawah ini.

a) Derajat Kesisteman (*Systemnes*)

Kesisteman (*Systemnes*) dalam partai politik ialah proses pelaksanaan fungsi partai yang dilakukan menurut urutan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan oleh partai, baik formal maupun non formal, ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi kesisteman bila partai politik melaksanakan fungsinya menurut AD/ART yang dirumuskan bersama (Lutfi. 2012).

Menurut Randall dan Svasand (2002:17) derajat kesisteman ini dapat diukur dari: pertama, asal usul partai politik (*origins*). Kedua, sumberdaya (*Resource*) atau disebut juga keuangan atau pendanaan. Ketiga kepemimpinan (*leadership*), lebih melihat siapa yang lebih menentukan didalam partai. Seorang pemimpin partai yang disegani atau kedaulatan anggota yang ditentukan oleh organisasi sebagai satu kesatuan. Keberadaan pemimpin yang mengandalkan kharisma menjadi karakteristik partai-partai dalam negara ketiga. Kharisma pemimpin sangat berperan positif dalam pendirian partai untuk menjaga koalisi partai dominan. Partai yang bergantung pada kharisma pemimpin memang pada

awalnya akan melejit tapi jika partai tersebut masih bergantung dengan tokoh pemimpin tersebut, maka partai tidak akan pernah terlembagakan. Keempat faksionalisme menyoroti siapa aktor yang membentuk atau menentukan faksi-faksi. Terakhir implikasi klientalisme menyelelidiki bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, apakah klientalisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) atau berdasarkan aturan main dalam konstitusi partai.

b) Identitas Nilai

Identitas partai politik (*Value infusion*). Identitas nilai partai politik didasarkan atas ideologi atau platform partai, basis sosial pendukungnya dan indentifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan partai. Identitas nilai tidak hanya terlihat pada pola atau arah kebijakan yang diperjuangkan, melainkan terlihat juga pada basis sosial pendukung. Partai dalam memperjuangkan kebijakannya tidak hanya mengandalkan kekuatan dari diri sendiri, partai juga memanfaatkan organisasi-organisasi sayap atau organisasi pendukungnya (Randall & Svasand, 2002:21).

Menurut Sigit (2010) Identitas nilai partai tidak hanya hubungan partai dengan kelompok

populis tertentu, atau dengan kelompok-kelompok tertentu. Akan tetapi juga dipengaruhi oleh klientalisme dalam organisasi, apakah hubungan partai dengan anggota bersifat formalitas atau lebih bersifat ideologis yang anggotanya mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identitas partai. Partai yang mempunyai basis pendukung yang spesifik niscaya akan memiliki identitas yang jelas.

Partai politik yang boleh dikatakan melembaga dari segi identitas nilai, ketika partai itu telah memiliki lapisan sosial atau golongan masyarakat sebagai pendukung loyal (basis sosial). Pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan partai akan dibawa dan bila dukungan yang diberikan kepada partai itu bukan semata-mata karena menerima materi tertentu dari partai tetapi karena orientasi politiknya sesuai ideologi atau platform partai itu (Lutfi, 2012).

c) Derajat Otonomi

Otonomi keputusan (*Desicional autonomy*) mengacu pada ketergantungan partai pada aktor-aktor eksternal (Randall & Svasand, 2002). Aktor-aktor tersebut ialah otoritas tertentu (penguasa), sumber dana (pengusaha atau lembaga luar) dan sumber dukungan massa. Hal yang terpenting dari dimensi ini

adalah: pertama, apakah partai tergantung kepada aktor luar tersebut atau hubungan itu bersifat independen. Kedua, apakah keputusan partai ditentukan oleh aktor luar atau hubungan itu berupa jaringan yang memberi dukungan kepada partai.

Ketergantungan partai terhadap aktor eksternal akan memberikan dampak bagi partai itu sendiri. Kehadiran para aktor luar cenderung menyebabkan pelebagaan partai menjadi lemah karena sumber dukungan pimpinan dan obojek loyalitas dipengaruhi oleh pihak aktor tersebut. Dari sini bisa menjadi ukuran otonomi keputusan dimana suatu partai politik bisa disebut melembaga jika keputusannya tidak dipengaruhi pihak luar (Randall & Svasand, 2002:22).

d) Pengetahuan Publik/Reifikasi

Reifikasi partai, mengacu pada sejauhmana suatu partai politik dipandang baik oleh masyarakat (Randall dan Svasand 2002:23). Reifikasi berkaitan dengan bagaimana partai mampu menjelma sebagai institusi yang memiliki nilai positif dan membawa dampak positif kepada publik. Dalam mendapatkan suara banyak dari konstituen, reifikasi partai politik merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai

telah tertanam pada imajinasi publik maka pihak lain, baik individu atau lembaga. keduanya akan menyesuaikan aspirasi, harapan, sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut.

Reifikasi juga dapat dilihat dari umur partai politik. Semakin tua umur suatu partai politik makin jelas citra atau pengetahuan publik mengenai partai tersebut (Pamungkas, 2010: 75). Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi pengetahuan publik bila masyarakat umum mengetahui wajah dan kiprah partai politik itu sesuai identitas nilai (platform) partai itu sehingga masyarakat pun dapat memahami (meski belum tentu setuju) mengapa suatu partai politik melakukan tindakan tertentu dan tidak melakukan tindakan lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian kualitatif

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode seperti ini lebih dipilih karena penelitian ini lebih mengutamakan analisa deskriptif. Metode ini merupakan metode - metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah individu atau kelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Cresswell, 2009:5).

Pendekatan penelitian yang peneliti pilih ialah pendekatan naratif. Pendekatan naratif merupakan strategi penelitian di mana peneliti menyelidiki kehidupan individu-individu dan meminta seseorang atau kelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka (Creewell, 2009:21). Setelah itu informasi yang didapat, diceritakan kembali oleh peneliti dalam bentuk kronologi naratif.

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan secara jelas dan faktual tentang pemasaran pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa di Tingkat Lokal.

2. Sumber dan jenis data

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh dari sumber utama atau langsung memberikan data kepada pengumpul data dan dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti (Sugiyono, 2018: 225).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui lapangan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung. Penulis turun langsung ke DPC PKB Kabupaten Kendal untuk mengumpulkan data berupa rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Data ini merupakan data mentah yang nantinya akan di proses.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, missal data tersebut lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2018:225).

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari mencari sumber-sumber lain yang mendukung tentang pelebagaan partai politik. Data data ini dapat dicari dari studi perpustakaan dengan cara membaca buku, literatur-literatur, serta informasi tertulis dan berbagai macam sumber lainnya. Selain itu, terdapat situs-situs Website yang diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu, sehingga mendapatkan makna dalam suatu topik tertentu (Dedi, 2010: 180). Melalui teknik wawancara maka mendapat informasi dari informan yaitu Muhammad Makmun sebagai Ketua Dewan Tanfidz PKB

Kabupaten Kendal, Ali Nurudin sebagai Ketua Dewan Syuro' PKB Kabupaten Kendal, Muhammad Zaenudin dan Dian Alfat sebagai Kader partai sekaligus anggota DPRD Kabupaten Kendal tahun 2019-2024, staff ahli DPC PKB Kabupaten Kendal Muhammad Akhyarudin.

B. Dokumentasi

Proses dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2018: 240). Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau dokumentasi. Peneliti akan mengumpulkan data dari hasil observasi dan proses wawancara dengan persetujuan dan perizinan tempat penelitian dari ketua DPC PKB Kabupaten Kendal. Dalam sesi wawancara juga peneliti meminta izin untuk proses wawancara didokumentasikan. Kemudian peneliti akan meminta foto bersama untuk membuktikan proses wawancara itu berlangsung secara valid.

C. Analisis Data

Menganalisis beragam bentuk data merupakan tugas menantang bagi peneliti kualitatif. Menurut

Chresswell (2015: 250) Proses analisis jauh lebih dari menyamakan analisis data dengan pendekatan untuk menganalisis data teks dan gambar, akan tetapi proses analisis juga melibatkan pengorganisasian data, pembacaan pendahuluan pada *database*, pengodean, pengorganisasian tema, penyajian data, dan penyusunan penafsiran data.

Analisis data merupakan cara seorang peneliti dalam mengelola data yang telah terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitiannya, karena data yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat dipergunakan begitu saja, analisis data menjadi bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat lebih berarti dan bermakna dalam memecahkan masalah.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dituangkan ke dalam bentuk laporan selanjutnya di reduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting. Dicari tema dan polanya disusun secara sistematis. Data yang

direduksi memberi gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan (Sugiyono, 2018:247).

b. Penyajian Data (*Display*)

Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Miles dan Huberman dalam Sugiono (2018: 249) menyatakan huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data ialah Fase akhir penyajian data dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian, dengan membuat penggambaran secara deskriptif masalah yang diteliti.

c. *Concluding Drawing/Verification*

Analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2018: 252). Penarikan kesimpulan dan verifikasi tersebut dilakukan oleh penulis untuk memperjelas hasil temuan di lapangan. Kemudian hasil tersebut disajikan dan diinterpretasikan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dapat memberikan kemudahan dalam memahami skripsi ini serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar. Skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yang mencakup lima bab, yaitu:

- | | |
|---------|--|
| Bab I | Pendahuluan

Bagian awal skripsi mencakup Halaman Judul, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan, Kata Pengantar, Persembahan, Motto, Abstraksi, Daftar Isi, Daftar Gambar, dan Lampiran. |
| Bab II | Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum penelitian mengenai tempat lokasi penelitian yang berada di Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal. Penulis akan menjelaskan tentang profil Kabupaten Kendal kemudian dilanjutkan dengan pemaparan profil Partai Kebangkitan Bangsa dan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa. Kabupaten Kendal |
| Bab III | Perjalanan Partai Kebangkitan Bangsa

Pada bab ini berisi tentang dinamika Partai Kebangkitan Bangsa dari pemilu 1999 hingga |

2019 serta membahas dinamika Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Kendal.

Bab IV Pembahasan mengenai Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal serta menganalisis pelembagaan partai dengan menggunakan teori pelambagaan partai politik.

Bab V Penutup
Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan dan berisi saran-saran untuk perkembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

Gambaran umum Lokasi Penelitian

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum penelitian mengenai tempat lokasi penelitian yang berada di Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal. Sebelumnya penulis akan menjelaskan tentang profil Kabupaten Kendal kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal.

A. Profil Kabupaten Kendal

Pada bagian lokasi penelitian berada pada Kabupaten Kendal penulis akan memaparkan mengenai kondisi wilayah penelitian, dan kondisi kondisi lainnya.

1. Wilayah Kabupaten Kendal

Gambar 1

Peta Kabupaten Kendal



Sumber: Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Kendal 2016-2020

Kabupaten Kendal merupakan salah satu dari 35 daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kendal terletak antara 60° 32' - 70° 24' Lintang Selatan dan antara 109° 40' - 110° 18' Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Kendal dibatasi oleh:

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Timur	: Kota Semarang
Sebelah Selatan	: Kabupaten Temanggung
Sebelah Barat	: Kabupaten Batang

Luas wilayah administrasi tercatat sebesar 100.223Ha, dengan luas wilayah yang terbesar adalah Kecamatan Singorojo, yaitu seluas 11.932Ha atau 11,91% dari luas Kabupaten Kendal secara keseluruhan. Sedangkan luas wilayah terendah adalah Kecamatan Ringinarum, luas wilayahnya sebesar 2.350Ha atau 2,34 % dari luas Kabupaten Kendal secara keseluruhan. Secara administrasi, Kabupaten Kendal terbagi dalam 20 kecamatan dan 285 desa/kelurahan.

2. Kondisi Demografi

a) Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Kendal pada tahun 2012 tercatat sebanyak 948.493 jiwa. Mengalami

penurunan sebesar 28.310 jiwa dari tahun sebelumnya (2011). Pada tahun 2012, Kecamatan Boja merupakan Kecamatan dengan konsentrasi penduduk terbesar dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Kendal yaitu 70.072 jiwa atau 7,39% penduduk Kabupaten Kendal. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Plan tungan dengan jumlah penduduk 30.501 jiwa atau 3,22 persen dari total penduduk di Kabupaten Kendal. Berikut jumlah penduduk secara rinci perkecamatan periode 3 tahunan (2010-2012):

b) Kepadatan Penduduk

Konsentrasi penduduk tahun 2012 pada Kabupaten Kendal secara total sebesar 946 jiwa/Km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Weleri, dengan luasan Kecamatan 30,29 Km² dan jumlah penduduk 59.419 jiwa didapat kepadatan penduduk 1.962 jiwa/Km². sedangkan kepadatan terendah terdapat pada Kecamatan Singorojo, hanya 427 jiwa/Km².

c) Kondisi Sosial Masyarakat

Pembangunan manusia merupakan proses untuk memperluas pilihan yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Pemberdayaan

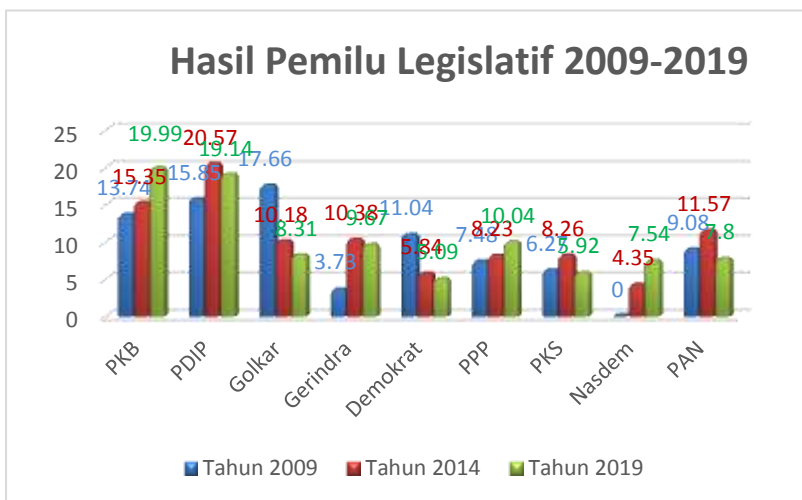
penduduk ini dapat dicapai melalui upaya yang menitikberatkan peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatkan derajat kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik. Pembangunan manusia seutuhnya tidak saja mencakup aspek fisik biologis, aspek intelektualitas, dan aspek kesejahteraan ekonomi semata, tetapi aspek iman dan ketaqwaan juga mendapat perhatian yang sama besar. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal tahun 2014 bahwa angka IPM Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dari 71,48 pada tahun 2012 menjadi 72,03 pada tahun 2013. Demikian juga bila dilihat dari komponen-komponen penyusun IPM, nampak komponen IPM mengalami peningkatan walaupun sangat kecil.

Menurut BPS Kabupaten Kendal 2014 secara absolut penduduk miskin Kabupaten Kendal tahun 2013 mengalami penurunan dari 121,20 ribu pada tahun 2012 menjadi 114,70 ribu pada tahun 2013.

Sedangkan garis kemiskinan naik 8,58 persen dari tahun sebelumnya.

d) Kondisi Politik legislatif di Kabupaten Kendal

Dinamika Politik di Kabupaten Kendal terlihat cair karena beberapa tahun pemilu legislative dari 2009 sampai dengan 2019 terlihat perolehan partai partai di Kendal tidak menentu. Berikut gambar statistik perolehan suara legislatif kabupaten Kendal:



Tabel 2

Sumber: Rekapitulasi KPU Kabupaten Kendal Tahun 2009-2019

Dari hasil diatas bahwa kondisi atau dinamika politik di Kabupaten Kendal dalam perolehan suara bagi partai politik tidak menentu. Hal ini menjadikan partai politik harus memapankan diri baik dalam kondisi internal maupun dalam kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat Kabupaten Kendal menjadi sebuah rintangan partai politik untuk mempersiapkan pelembagaannya sendiri dan pemilu berikutnya.

Dalam perolehan suara diatas, pertama pada pemilu 2009 *jariungu.com* merilis kouta dan nama calon yang terpilih ialah 50 kursi. Pada tahun ini partai GOLKAR menjadi partai pemenang dengan mendapatkan 10 kursi. Kemudian disusul oleh PDIP dengan mendapatkan kursi 8. Posisi ke-tiga ada Partai Kebangkitan Bangsa yang mendapatkan delapan kursi. Sementara Partai Amanat Nasional mendapatkan 7 kursi. Sisanya Partai Demokrat mendapatkan 6 kursi, PKS dan PPP mendapatkan 4 kursi, Hanura 2 kursi dan yang terkahir PKNU mendapatkan kan 1 kursi.

Pada pemilu tahun 2014 dilansir *tribunnews.com* partai politik Kabupaten Kendal merebutkan 45 kursi legislatif yang di dapatkan oleh partai politik Kabupaten Kendal ialah pertama, PDIP memimpin pendapatkan kursi yang mendapatkan 9 kursi legislatif disusul perolehan kursi nomor 2 yaitu PAN yang mendapatkan 7 kursi legislatif, kemudian diperingkat ketiga disusul oleh PKB mendapatkan 6 kursi. Sementara PPP mendapatkan 5 kursi, partai Golkar dan partai

Gerindra mendapatkan 4 kursi, partai Demokrat tiga kursi dan yang terakhir partai Hanura mendapatkan 2 kursi.

B. Gambaran Umum Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada pelebagaan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal. Berikut penjelasan mengenai profil Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal

1. Partai Kebangkitan Bangsa

a) Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa

Berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa diceritakan dalam homepage *pkb.id* (2019) bermula dari lengsernya Presiden Soeharto pada 21 mei 1998. Peristiwa tersebut menandai lahirnya era baru negara Republik Indonesia yang disebut era reformasi. Setelah peristiwa era reformasi terjadi, demokrasi di Indonesia semakin terbuka luas. Kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia (HAM) diberlakukan secara adil. Tak lama lagi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerima usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air untuk mendirikan partai politik, bahkan ada yang mengusulkan NU akan dijadikan partai politik.

Antusiasme warga NU sangat terlihat jelas pada waktu itu. Mulai dari pengusulan nama

partai, lambang partai, sampai halnya AD/ART dan pengurus partai yang sudah disiapkan. Dalam pemberian nama partai PBNU mencatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan waktu itu ialah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa. Untuk lambang partai politik usulan yang terbanyak adalah gambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau. Diantara usulan yang sangat lengkap dari Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai K.H.M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat (*pkb.id*, 2019).

Pada waktu itu PBNU tidak mau tergesa-gesa dan cukup berhati hati dalam menanggapi usulan dari warga NU. Hal ini didasari pada hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo, bahwa menetapkan secara organisatoris NU tidak boleh terkait dengan partai politik manapun dan tidak boleh melakukan kegiatan politik praktis. Dari sikap kehatian-hatian ini membuat sebagian warga NU menilai PBNU tidak cepat tanggap. Banyak pihak yang agak kecewa, bahkan ada yang langsung mengumumkan berdirinya partai politik, seperti Partai Bintang Sembilan dan Partai

Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon (*pkb.id, 2019*).

PBNU tidak mau diam saja, pada tanggal 3 juni 1998 dilaksanakan Rapat Harian Syuriah dan Tadfidziyah, PBNU membentuk Tim Lima yang ditugaskan untuk memenuhi aspirasi masyarakat NU. Tim tersebut diketuai oleh K.H. Ma'ruf Amin (Rais Syuriah), dengan anggota K.H. M. Dawam Anwar (Katib PBNU) dan H. Ahmad Bagdja (Sekjen PBNU) (*pkb.id, 2019*).

Setelah tim 5 dibentuk, banyak kegiatan yang dilalui, seperti silahturahmi ke beberapa daerah. Pada akhirnya pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau tanggal 23 Juli 1998 di kediaman Gus Dur, Cianjur, Jakarta Selatan Partai Kebangkitan Bangsa dideklarasikan (Kazhim & Hamzah. 1999).

Dalam sejarah tersebut Menurut Arief Efendi (1998) berdirinya PKB bukan sekedar lahirnya wadah baru penyaluran aspirasi politik bagi warga Nahdliyin. Efendi menambahkan PKB akan menjadi parameter bagi soliditas politik organisasi sosial keagamaan yang berbasis massa di pesantren dan pedesaan, setelah pembentukan partai tersebut. Meskipun, didukung sejumlah kiai

dan santri, partai ini tetap memilih berasaskan Pancasila.

b) Makna Lambang

Lambang di sebutkan pada pasal 9 anggaran dasar (AD/ART PKB, 2014), lambang partai terdiri dari bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang dengan tulisan nama partai pada bagian bawah, dengan bingkai dalam empat persegi bergaris ganda, dan tulisan PKB di bawahnya yang diberi bingkai luar dengan garis tunggal. Berikut gambar lambang dan arti lambang Partai Kebangkitan Bangsa dalam anggaran rumah tangga Bab VI pasal 1 ayat 1;

Gambar 2
Logo Partai Kebangkitan Bangsa



Sumber gambar: <https://infopemilu.kpu.go.id>. Diunduh pada tanggal

20 september 2019

Sembilan bintang melingkari bola peta Indonesia. Bumi dan peta Indonesia, bermakna tanah air Indonesia yang merupakan basis perjuangan partai dalam usahanya untuk mencapai sebagaimana termaktub dalam pasal 7 Anggaran Dasar (AD/ART PKB, 2014). Sembilan bintang bermakna kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan.

Tulisan nama partai bermakna identitas diri partai yang berfungsi sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis. Bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis perjuangan partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin, secara sejajar (AD/ART PKB, 2014).

Arti warna disebutkan pada ayat kedua anggaran rumah tangga pasal satu yaitu putih, bermakna kesucian, ketulusan, dan

kebenaran yang menjadi etos perjuangan partai. Hijau bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan perjuangan partai. Kuning bermakna kebangkitan bangsa yang menjadi nuansa pembaruan dan berpijak pada kemaslahatan umat manusia (AD/ART, 2014).

c) Ideologi PKB

Dalam konteks politik menurut Azizah (2012) ideologi adalah sistem kepercayaan yang menerangkan dan membenarkan suatu tatanan politik yang ada atau yang dicita-citakan, dan memberi strategi berupa prosedur, rancangan, instruksi, ide, norma, kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politik.

Asas Partai Kebangkitan Bangsa adalah Pancasila, sedangkan prinsip dasar perjuangan yang dianutnya adalah

menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* (AD/ART, 2014:13).

Tujuan pendirian Partai Kebangkitan Bangsa dalam AD/ART (20014:14) adalah (1) mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945; (2) mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir-batin, materialspiritual; (3) mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih, dan berakhlakul karimah. Asas prinsip, dan tujuan di atas, jelaslah bahwa Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai terbuka; artinya partai ini bisa dimasuki oleh siapapun dan dengan dilatarbelakangi mazhab atau organisasi manapun karena partai ini tidak semata-mata partainya orang Nahdlatul Ulama'. Namun demikian, kenyataan yang acapkali terlontar oleh penggagas partai yang menggambarkan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa merupakan

partainya orang Nahdlatul Ulama'. Memang harus dibedakan antara keduanya. Bahwasanya Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai politik, sedangkan Nahdlatul Ulama' adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang cakupan kegiatannya lebih luas daripada partai politik.

d) Misi Partai Kebangkitan Bangsa:

Dalam *PKB.id* (2019) disebutkan ada lima bidang misi partai yang harus diperjuangkan, berikut misi partai terkait bidang-bidang tersebut:

1. Bidang Ekonomi

Menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis.

2. Bidang Hukum

Berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;

3. Bidang Sosial Budaya

Berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara

jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

4. Bidang Pendidikan

Berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan.

5. Bidang Pertahanan

Membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

e) Mabda' Siyasi

Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain didunia, serta mampu

mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia(Kazhim & Hamzah. 1999:244).

Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (*as-shidqu*), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (*Al-Amanah Wa Al-Wafa-u Bi Al-Ahdli*), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (*Al-'adalah*), tolong menolong dalam kebajikan (*Al-Ta'awun*) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (*Al-Istiqomah*) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (*Al-Syuro*) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum

(*Al-Musawa*) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan(Kazhim & Hamzah. 1999:244).

Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (*Hifdzu Al-Nafs*), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (*Hifdzu Al-Din*), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (*Hifdzu Al-Aql*), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (*Hifdzu Al-Nasl*) dan terpeliharanya harta benda (*Hifdzu Al-Mal*). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan

yang mengandung kemunkaran (Kazhim & Hamzah. 1999:244).

Penjabaran dari misi yang di emban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tenteram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat (Kazhim & Hamzah. 1999:245). Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya bisa diberikan pada pihak lain yang

memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat (Kazhim & Hamzah. 1999:245).

Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat (Kazhim & Hamzah. 1999:245-246). Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan tidak tak terbatas dan tidak memusat di satu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik,

bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.

Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (*Ukhuwah Diniyah*), kebangsaan (*Ukhuwah Wathoniyah*), dan kemanusiaan (*Ukhuwah Insaniyah*), dengan selalu

menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya (Kazhim & Hamzah. 1999:246).

Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (*Insaniyah Diniyah*), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis (Kazhim & Hamzah. 1999:246).

Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras,

dan lintas golongan yang dimanestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai (Kazhim & Hamzah. 1999:246).

2. Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal

Dewan Perwakilan Cabang PKB Kabupaten Kendal merupakan kesatuan organisasi dan kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa di Tingkat Daerah yang mempunyai fungsi melaksanakan kerja-kerja partai terkait konsolidasi, koordinasi, optimalisasi kegiatan partai dalam menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat (AD/ART, 2014). Bisa dikatakan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal ialah kepanjangan tangan dari PKB Pusat untuk memperjuangkan ideologinya di tingkat daerah dan melaksanakan tugas dan fungsi partai di Kabupaten Kendal.

Dalam menjalankan roda partai Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Kendal sebagai pimpinan kolektif di tingkat daerah yang memiliki tugas, wewenang dan

tanggung jawab sebagaimana yang telah diamanahkan dalam pasal 22 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa tahun 2014.

DPC PKB Kabupaten Kendal menaungi 20 Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) dan juga menaungi Dewan Pengurus Ranting (DPRt) sejumlah 168 DPRt di wilayah Kabupaten Kendal. Selain itu, terdapat beberapa organisasi otonom yang dibentuk PKB, diantaranya Perempuan Bangsa, Garda Bangsa dan Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) (*Doc. DPC PKB Kab. Kendal, 2018*).

3. Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal Periode Tahun 2018-2023

Susunan pengurus Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal ada tiga kepengurusan. Pertama, Dewan Syuro' adalah dewan penjaga garis-garis perjuangan partai. Kedua, Dewan Tanfidz adalah dewan pelaksana partai. Ketiga, Mustasyar adalah dewan penasihat partai.

Sebelumnya periode kepemimpinan DPC masa jabatan 2013-2015 sudah diganti pada tahun 2018. DPC Partai Kebangkitan Bangsa berhasil melakukan musyawarah cabang (Muscab) pada tanggal 2 juni 2018, bertempat di Pondok Pesantren Al Fadllu 2

Srogo, Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal.

Berikut susunan Kepengurusan Dewan Pengurus
Cabang Kabupaten Kendal masa jabatan 2018-2023;

1) **Mustasyar**

1. K.H. Nur Kholis Ali
2. K.H. Sholahudin Chumaidulloh
3. K.H. Abdul Wahid Hasyim
4. K.H. Makmun Amin
5. K.H. Abdullah Said, S.E.
6. Ny. Hj. Musyarofah
7. K.H. Zainal Arifin
8. Ky. Sanusi

2) **Dewan Syuro'**

Ketua	: K.H. Ali Nurudin, S.Sos. M.Si.
Wakil Ketua	: K.H. Moch Ali Chasan, M.Si.
Wakil Ketua	: K.H. Muhlasin
Wakil Ketua	: K.H. Nidhomudin Asror
Wakil Ketua	: K.H. Muwafiq
Wakil Ketua	: K.H. Zubaidi
Sekretaris	: K. Sonhaji
Wakil Sekretaris	: Drs. H. Turmudzi
Wakil Sekretaris	: K.H. Fahrurozi
Wakil Sekretaris	: Ky. Mandur Labib
Anggota	: K.H. Ishomudin

Anggota	: K.H. Ahmad Zaini
Anggota	: K.H. Abdullah
Anggota	: K.H. Zaidun
Anggota	: H. Abu Hapsin Al Muktafa
Anggota	: Hj. Rofiah
Anggota	: H.M. Fauzun, S.H.
Anggota	: Ky. Mufton
Anggota	: Hj. Solikatun
Anggota	: Hj. Afidatun Nisa
Anggota	: Ny. Rozanah
Anggota	: Nurul Nashoha
Anggota	: Hj. Rochimah
Anggota	: Ny. Muhimah
Anggota	: Ny. Susniyah

3) Dewan Tanfidz

Ketua	: H. Muhammad Makmun, S.H.I.
Wakil Ketua	: H. Yusuf
Wakil Ketua	: Khotibul Umam, S.E.
Wakil Ketua	: H. Sugiyarto, S.H.
Wakil Ketua	: H. Solakudin
Wakil Ketua	: H. Muhammad Iqbal
Wakil Ketua	: Hj. Jamaliyah, B.A.
Wakil Ketua	: Muraji, S.Pd.
Wakil Ketua	: Ora. Hj. Muzayanah, M.Pd.
Wakil Ketua	: Abidin, S.Pd.

Wakil Ketua	: H. Ali Nahdlodin
Sekretaris	: Mahfud Shodiq
Wakil Sekretaris	: H. Abdul Qudus Nuh, B.Sc.
Wakil Sekretaris	: Kholid Abdullah
Wakil Sekretaris	: M. Mahzum, S.T.
Wakil Sekretaris	: Budiharto
Wakil Sekretaris	: Mokh. Ali Masyhar
Wakil Sekretaris	: A. As'ari
Wakil Sekretaris	: Hj. Niken Larasati, S.E.
Wakil Sekretaris	: Siti Falisdah Khakimah, S.Ag.
Wakil Sekretaris	: Sarofatun
Wakil Sekretaris	: Imma Saidatun Niklah, S.Hum.
Bendahara	: Muhammad Zainudin
Wakil Bendahara	: Dian Alfat Muchammad
Wakil Bendahara	: Musta'in
Wakil Bendahara	: Syamsul Huda
Wakil Bendahara	: Lilik Nur Kholidah
Wakil Bendahara	: Rosyidin
Wakil Bendahara	: Rofi'atun, S.Ag., M.Pd.
Wakil Bendahara	: Syafa'atun
Wakil Bendahara	: Izatul Yazidah
Wakil Bendahara	: Siti Rusmini, S.Pd.
Wakil Bendahara	: Santi
Wakil Bendahara	: Siti Rochanah
Wakil Bendahara	: Inayah, S.Pd.

BAB III

Dinamika Partai Kebangkitan Bangsa

Bab ini menjelaskan tentang dinamika Partai Kebangkitan Bangsa baik dari skala nasional maupun lokal. Pengaruh lahirnya partai ini antara skala nasional dan skala akan penulis paparkan di bawah ini.

1. Partai Kebangkitan Bangsa dan Pemilu di Indonesia

Sejarah pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia pasca kemerdekaan dimulai pada tahun 1955, pada tahun ini sebagian kalangan dianggap sebagai pemilu yang demokratis selain Pemilu 1999. Pada pemilu tahun 1955, Partai Nasional Indonesia (PNI) meraih 22,3 persen suara, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) 20,9 persen, Nahdlatul Ulama (NU) 18,4 persen dan Partai Komunis Indonesia (PKI) 16,4 persen (Budiardjo, 2008).

Setelah era orde lama berganti, pemilu baru bisa terlaksana kembali pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Tepatnya, pada tahun 1971 pemilu kali ini diikuti oleh sepuluh partai politik, termasuk Golongan Karya (Golkar), kontestan baru yang kemudian menjadi kekuatan politik utama di masa itu. Dua tahun setelah pemilu, muncul keputusan untuk melakukan penyederhaan dengan

pengelompokan ke dalam tiga golongan. Empat Partai Islam, masing-masing Nahdlatul Ulama', Partai Muslimin Indonesia, Partai Sarekat Islam Indonesia dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada tahun 1984, Nahdlatul Ulama' memutuskan tidak berpolitik, Nahdlatul Ulama' kembali kepada khitahnya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan (Porter, 2002). Sementara, lima partai PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia bergabung ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan yang terakhir adalah Golongan Karya atau Golkar, kesemua partai harus berasaskan Pancasila.

Pada masa Orde Baru, dinamika partai politik menjadi sangat rendah. Utamanya, dalam konteks partisipasi politik bangsa Indonesia. Pada masa perjuangan menjelang kemerdekaan, partai politik hadir sebagai bagian dari bangkitnya semangat kemerdekaan. Sementara Soekarno maupun Soeharto menganggap sebaliknya kalau partai politik itu sebagai sumber kekacauan sistem politik yang mereka bangun (Budiardjo, 2008).

Sejak tahun 1998, Indonesia memasuki fase baru dalam politik. Lengsernya Suharto menandai berakhirnya era otoritarianisme dan dimulainya era demokrasi. Dalam pemilihan umum (Pemilu), salah satunya ditandai dengan

hadirnya kontestan yang lebih banyak dibanding pada masa Orde Baru. Pemilu pertama setelah reformasi tahun 1999 tercatat 48 partai politik ambil bagian dalam pesta demokrasi tersebut. Menurut Choire (2008) pada masa orde baru Nahdlatul Ulama' tidak melakukan aktivitas politik kekuasaan, tidak bisa melepaskan diri dari euforia reformasi. Nahdlatul Ulama' yang tidak sanggup membendung desakan warganya yang sangat berhasrat untuk memiliki saluran politik, juga merasa perlu untuk memanfaatkan momentum tersebut untuk berpartisipasi dengan mendirikan partai politik.

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan produk reformasi dimana yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya kelahirannya yang dibidani oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama'. Sejak berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa, partai ini sudah mengalami pergantian kepemimpinan. Pergantian kepemimpinan ini dilakukan sebagai upaya demokratis didalam internal partai dan juga melaksanakan ketertiban AD/ART yang sudah dibentuk. Pada 23 Juli 1998 Matori Abdul Djalil ditetapkan sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam kancah politik tantang terbesar pada masa itu ialah menjadikan Partai Kebangkitan Bangsa bisa meraih hasil maksimal pada pemilihan umum tahun 1999. Karena Partai Kebangkitan Bangsa sendiri baru berumur satu tahun kala itu. Akan tetapi lahirnya partai ini menjadi perhatian masyarakat

luas karena pada kondisi politik di Indonesia saat itu menenutut adanya reformasi. Partai Kebangkitan Bangsa pada pasca reformasi dianggap mampu menampung aspirasi politik masyarakat, terutama dari kalangan warga Nahdlatul Ulama'(*pkb.id*, 2019). Pada Masa kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid dan Matori Abdul Djalil, Partai Kebangkitan Bangsa mampu memperoleh suara 13.336.963 dengan prosentase 11,04 serta mendapatkan 51 kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Tak tanggung tanggung partai ini bisa menjadi suara terbanyak untuk partai Islam serta bertengger di urutan ke-3 nasional. Kemudian pada era itu koalisi poros tengah reformasi menunjuk KH. Abdurrahman Wahid untuk maju sebagai calon presiden. Tokoh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa ini berhasil mendapatkan tugas sebagai presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada sidang umum.

Pada pemilu tahun 2004 dalam *pkb.id* (2019), Partai Kebangkitan Bangsa kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan menaruh kadernya di kursi Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 52, hasil ini menunjukkan peningkatan perwakilan. Disamping itu ada penurunan perolehan suara yang tadinya 12.60% menjadi 10,57%. Kemudian pada periode 25 Mei 2005 Muhaimin Iskandar resmi menjadi ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian pada Pemilu 2009 Partai Kebangkitan Bangsa

mengalami kemunduran perolehan suara. Partai Kebangkitan Bangsa hanya mendapatkan suara 4,94% dan hanya menempatkan 27 kursi.

Dalam berjalannya waktu masalah dalam internal partai ini muncul. Menurut hasil perolehan yang buruk dimulai dari adanya konflik internal partai. Setidaknya ada tiga kali konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa yang cukup mengganggu roda kepartaian. Pertama, konflik terjadi antara perselisihan KH. Abdurrahman Wahid dan Matori Abdul Djalil pada tahun 2001, Pertama, konflik dengan Matori Abdul Djalil pada tahun 2001. Kedua, Konflik dengan kelompok Alwi Shihab-Choirul Anam pada tahun 2004. Ketiga, konflik Gus Dur-Muhaimin Iskandar pada 2008 (Chusnunia, 2011). Menurut Chusnunia (2011) konflik tersebut menjadikan Partai Kebangkitan Bangsa terpecah menjadi dua dan menjadikan suara pada pemilu 2009 merosot.

Partai Kebangkitan Bangsa senantiasa memperbaiki diri setelah terjadinya penurunan yang sangat dratis. Pengalaman untuk keluar dari situasi sulit. Dilihat dari perolehan pada tahun 2014 partai ini mampu memperoleh 11.298.957 suara dan berada di posisi ke lima suara nasional. Pada tahun itu pula konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa sudah tidak ada lagi antara pendukung Gus Dur dan Cak Imin. Hingga pada tahun 2019 Partai Kebangkitan Bangsa mampu memperoleh 13.670.097 suara (*kpu.id*, 2019).

2. Dinamika Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal

Hadirnya partai ini untuk menyalurkan aspirasi kaum Nahdliyin, seperti apa yang sudah dijelaskan diatas terkait lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa. Namun perjalanan awal partai ini di Kabupaten Kendal sendiri belum bisa menarik jumlah suara yang signifikan. Sementara dalam kurun pemilu 2019 Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal mendapatkan kepercayaan banyak dari masyarakat Kendal terutama dari kaum Nahdliyin itu sendiri. Seperti yang di katakan Alamuddin Dimiyati Rois pada situs berita *PKB.id*; "Sejak Pemilu 1999, PKB Kendal baru kali ini menjadi pemenang pemilu," diakses pada 20 November 2019.

Kemenangan pada pemilu 2019 ini menjadi bukti bahwa keberadaan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal sangat dipercaya oleh masyarakat Nahdliyin maupun umum.

Melihat dari berdirinya partai ini dan hubungan erat partai ini dengan basis kultural NU belum bisa memenangkan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal. Sementara salah satu tokoh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa berada di Kabupaten Kendal ialah KH. Dimiyati Rois. Bahwasannya keberadaan tokoh partai di Kabupaten Kendal belum bisa menjamin kemenangan di daerah. Fenomena ini seperti yang

dikatakan Eristyawan (2013) bahwasannya pendiriannya Partai Kebangkitan Bangsa memang diidentikkan dengan partai yang didirikan oleh petinggi atau kiai-kiai NU dengan harapan dapat menjadi saluran aspirasi politik kaum Nahdhiyin, atau dengan kata lain asal-usul partai dibentuk dari atas disambut dari bawah. Namun pada kenyataannya Partai Kebangkitan Bangsa pada pemilu yang lalu tidak disambut dari bawah oleh kaum Nahdhiyin yang terlihat dari rendahnya suara Partai Kebangkitan Bangsa di daerah basis kaum Nahdhiyin.

Ada beberapa faktor yang harus dibenahi oleh Partai Kebangkitan Bangsa baik Nasional maupun di daerah. Partai Kebangkitan Bangsa harus memantapkan pelembagaannya sehingga dapat diterima seluruh masyarakat bawah. Kemudian melihat dari pemilu-pemilu sebelumnya sepuluh tahun kemarin pada pemilu pemilu kemarin. Pada pemilu legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal memperoleh suara terbanyak pada tahun pemilu 2019 di Kabupaten Kendal. Sebelumnya pada pemilu legislatif tahun 2009 PKB hanya bisa memperoleh suara 13.74% berada di bawah partai Golkar dan PDIP (*KPU Kab. Kendal*, 2009). Sementara pada pemilu legislatif pada tahun 2014 mendapatkan suara 15.35%, serta menjadi partai nomer dua setelah PDIP dalam perolehan suara di Kendal.

Suara partai-partai memang tidak menentu akan tetapi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal bisa mampu memperoleh suara secara signifikan dari tahun 2009-2019 dan mendapatkan suara tertinggi pada tahun pemilu 2019. Dari keberhasilan tahun ini Partai Kebangkitan Bangsa berkembang lebih baik, seperti pemantapan pelembagaan partai yang telah dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal.

BAB IV

Deskripsi dan Analisis Data

A. Derajat Kesisteman (*Systemness*)

Mengenai penataan organisasi partai politik menurut lutfi (2012) ada tiga indikator untuk mengukur pelaksanaan fungsi-fungsi penataan yaitu penerapan demokrasi internal partai, sistem dan kaderisasi partai, serta kohesivitas partai.

1. Demokrasi internal

Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal menerapkan demokrasi di internal partai berpedoman pada mekanisme prosedur AD/ART tahun 2014 yang dilakukan di Surabaya. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kebebasan kepada seluruh anggota dan pengurus partai agar terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Sebelumnya pada ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal sementara masa jabatan 2016-2018 ditunjuk oleh DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena ketua sebelumnya Benny Karnadi sudah mengalami masa purna pada 2016. Kemudian dilakukannya penundaan Muscab V PKB Kabupaten Kendal yang dilakukan oleh DPP PKB selama 2 tahun dan ditunjuklah Muhammad Makmun sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa sementara selama 2 tahun tersebut.

Setelah dilakukannya Muscab V Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal sangat mengedepankan proses musyawarah dalam menentukan kepemimpinan. Pada pergantian kepemimpinan ada tiga Dewan yang harus dipilih setiap 5 tahun sekali yaitu Dewan Mustasyar, Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz. Pemilihan Dewan Mustasyar berbeda dengan Tanfidz dan Dewan Syuro'. Menurut Akhyarudin selaku staff ahli kantor Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal Dewan Mustasyar dipilih melalui rapat formatur. Sementara Dewan Tanfidz dan Dewan Syuro' selama 5 tahun sekali. Kemudian Dewan Tanfidz dan Dewan Syuro' dipilih di Muscab selama 5 tahun sesuai dengan AD/ART;

“Dewan Tanfidz, Dewan Syuro' dan Dewan Mustasyar dipilih secara 5 tahun satu kali dengan cara yang berberda. Dewan Tanfidz dan Dewan Syuro' dipilih melalui Muscab sementara Dewan Mustasyar dipilih melalui rapat formatur”. (Akhyarudin. 19. Desember 2019).

Dalam AD/ART (2014) yang dipilih secara langsung hanya dua struktur jabatan yaitu Dewan Tanfidz dan Dewan Syuro'. Pemilihan Dewan Tanfidz dan Dewan Syuro' dipilih melalui cara usulan dari Dewan Pengurus Anak Cabang terkait calon ketua/pemimpin.

Kemudian akan di musyawarahkan bersama di agenda Muscab (Musyawarah Cabang). Materi Muscab dibagikan sebelum 15 hari sebelum Muscab dilaksanakan. Dalam materi Muscab V Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal membahas terkait Tata Tertib Muscab V DPC Kabupaten Kendal dan laporan pertanggungjawaban pengurus cabang Kabupaten Kendal. Tata Tertib Materi Muscab V Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal terlampir pada lampiran.

Setelah dilakukan Muscab yang demokratis dimana pemilihan itu dilaksanakan dengan cara musyawarah dengan mengusulkan nama-nama calon Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal semakin solid dalam persatuan internal organisasi. Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal sementara ini mampu meminimalisir perpecahan antar kader dengan selalu menegedepankan musyawarah dan belajar dari pengalaman yang tidak diinginkan salah satu kader yang pindah partai karena perbedaan. Seperti yang dikutip dari wawancara Muhammad Makmun selaku Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Kendal:

“Jadi memang di PKB hari ini untuk membuat kondifitas partai ketika musyawarah cabang sangat meminimalisir voting dan mengedepankan musyawarah mufakat. Pembelajaran setelah

regenerasi kepemimpinan ketika sudah melaksanakan mekanisme voting terjadi selalu pertarungan antar kader, sehingga banyak yang kalah akan sakit hati kemudian sudah tidak di PKB. Makanya kemarin kebijakan DPP PKB menginstruksikan tidak akan menyelenggarakan muscab sebelum terjadinya konduktifitas di daerah, termasuk di Kabupaten Kendal. Alhamdulillah pada tahun 2017 kemarin kita bisa melaksanakan muscab dengan musyawarah mufakat tanpa melalui proses voting. Sehingga Alhamdulillah dari susunan awal terbut bisa membentuk kekuatan” (Muhammad Makmun, 2 September 2019).

Proses demokrasi yang baik, telah diterapkan ketika Muscab V 2018 di Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal dengan cara memaksimalkan musyawarah. Dalam catatan ada beberapa kondisi kondisi tertentu, adanya intervensi dari DPP PKB terkait Muscab V yang ditunda dan dilantiknya Ketua Dewan Tanfidz sementara. Penundaan tersebut di karenakan DPC Partai Kebangkitan Bangsa harus menjaga kohesivitas partai pada tahun 2016-2018.

2. Keutuhan Organisasi

Sesudah pergantian kepemimpinan Dewan Tanfidz dan Dewan Syuro pada Mucab V 2018 Partai Kembangkitan Bangsa memperkuat keutuhan partai tidak hanya melalui dari mengedepankan musyawarah. Dalam

keutuhan ini ada disisi lain yang mempenaruhi yaitu kegiatan partai dan peraturan partai. Dalam hal kegiatan Partai Kebangkitan Bangsa mengadakan acara konsolidasi dengan DPAC dan DPRt selama satu bulan sekali dibarengkan dengan waktu rises anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal. Konsolidasi ini untuk menjaga komunikasi antara DPC dan struktur dibawahnya dan dibarengi untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal secara keseluruhan pada masa kepemimpinan Muhammad Makmun meminimalisir konflik di internal partai. Karena dalam penanganannya Partai Kebangkitan Bangsa mengikuti prosedur (AD/ART) yang ada dan dalam hal musyawarah yang sering kali melibatkan semua anggota. Dengan mengedepankan proses musyawarah dan belajar dari pengalaman di internal Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal. DPC PKB Kabupaten Kendal senantiasa mengelola konflik dengan baik, tentunya dengan mengedepankan proses musyawarah partai.

Keutuhan Partai Kabupaten Kendal juga bisa dilihat melalui kekompakan kader. Sehingga memberikan kemenangan kepada partai. Dikatakan oleh dewan syura Ali Nurudin:

“Alhamdulillah khususnya untuk dikendal tidak adanya faksi, solid kompak. Kalau partai sudah kemasukan itu ya, satu konflik dan ada perbedaan sehingga partai akan sulit berkembang dan tidak akan memenangkan pemilu” (Ali Nurudin, 12 Agustus 2019).

Keberhasilan pengelolaan internal partai sekarang ini sesuai diungkapkan oleh luthfi (2012), bahwasannya salah satu upaya partai untuk meredam munculnya faksi-faksi adalah dengan berupaya memberdayakan mereka serta melibatkannya dalam proses pengambilan keputusan. Karena perpecahan sering terjadi karena kurangnya komunikasi dan koordinasi diantara pengurus, sehingga menimbulkan kesalahan paham yang berujung pada kekecewawaan pada sebagian anggota. Sebelumnya dalam demokrasi internal Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal mengalami perpecahan sebagian anggota, sehingga berdampak keluarnya salah satu orang tersebut di Partai Kebangkitan Bangsa.

Disamping itu Partai Kebangkitan Bangsa Kendal sejauh dalam kepemimpinan baru mampu mengelola permasalahan yang ada dan membenahi serta tidak ingin lagi satu masalah memungkinkan perpecahan yang sudah terjadi.

3. Keanggotaan dan Kaderisasi

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai terbuka dan menerima semua kalangan. Rekrutmen anggota dan pengurus secara prosedur telah diatur dalam AD/ART partai. Berbagai upaya perekrutan yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal baik melalui media sosial maupun dari informasi yang ada, seperti yang dikatakan oleh Muhammad Makmun;

“Kita banyak mekanisme yang kita tempuh, jadi semaksimal mungkin kita manjaring, mencari potensi orang-orang yang satu misi dengan kita untuk bareng-bareng membesarkan partai, itu juga juga mekanisme pembukaan melalui website, pembukaan secara umum dan bahkan kita anggap ada orang berpotensi maka kita jemput bola. Mekanismenya tidak hanya menunggu kita harus bergerak” (Muhammad Makmun, 2 September 2019).

Perekrutan partai kebangkitan bangsa ada beberapa macam yaitu perekrutan menjadi anggota partai, perekrutan menjadi simpatisan dan perekrutan menjadi caleg. Pada tahun 2019 ini Partai Kebangkitan Bangsa merekrut bakal calon legislatif, disamping itu bakal caleg yang sudah diterima akan menjadi anggota partai secara otomatis.

Perekrutan partai dilaksanakan dengan membuka pendaftaran anggota partai, simpatisan partai,

dan perekrutan anggota legislative, dibuka secara umum. Pendekatan kekerabatan yang paling mencolok, menjadi salah satu upaya untuk merekrut anggota partai. Hal yang lain dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal ialah melalui ranah kultural itu sendiri, dimana pendekatan ini sangat berpengaruh besar dalam rekrutmen Partai Kebangkitan Bangsa. Ranah kultural diantaranya hubungan Nahdlatul Ulama' dengan Partai Kebangkitan Bangsa, tidak dipungkiri kader kader disini mayoritas dari anggota Nahdlatul Ulama'. Dian Alfat selaku kader partai baru dan berhasil menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal 2019 mengungkapkan ketika dirinya masuk di Partai Kebangkitan Bangsa, karena ada keterikatan antara Nahdlatun Ulama' dan Partai Kebangkitan Bangsa;

“Kerana saya orang Nahdlatun Ulama' ya saya berkiprah di Partai Kebangkitan bangsa. Saya masuk Partai ini info dari temen ke temen” (Dian Alfat, 12 Agustus 2019).

Mengamati pola rekrutmen yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal seperti yang diterangkan diatas, maka dapat kita lihat, walaupun sedikit inovasi yang dilakukan partai akan tetapi akar partai yang sangat berhubungan erat dengan organisasi

masyarakat yaitu Nahdlatul Ulama'. Menjadi faktor yang tidak bisa dihindari, keselarasan ideologi yang dibawa, serta sejarah antara keduanya yang tidak bisa dijauhkan.

Dalam internal partai proses kaderisasi yang dilakukan untuk anggota partai ada beberapa macam. Pelatihan Kepemimpinan Pertama dan Pelatihan Kepemimpinan Menengah. Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal sudah melakukan Pelatihan Kepemimpinan Pertama. Ada juga beberapa pelatihan bagi calon yang akan menempati jabatan strategis. Secara program Partai Kebangkitan Bangsa memiliki arah yang jelas untuk melakukan pengembangan kompetensi bagi kader-kadernya. Sehingga Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal sangat berupaya melaksanakan amanah partai sesuai dengan ketentuan dan peraturan partai.

Dalam menjalankan dimensi kesisteman, seperti yang diatas Partai Kebangkitan Bangsa berusaha melakukan proses pelaksanaan fungsi partai yang sesuai dengan urutan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan oleh partai, baik formal maupun non formal, ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Seperti menurut Lutfi (2012) suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari

segi kesisteman bila partai politik melaksanakan fungsinya menurut AD/ART yang dirumuskan bersama. Banyak rintangan dalam dimensi kesisteman Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal. Pada tahun 2016 DPP tidak mengizinkan partai ini melakukan Muscab V. Kemudian DPP PKB menunjuk Muhammad Makmun sebagai Ketua Dewan Tanfidz sementara. Setelah dua tahun DPP mengizinkan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal melakukan Muscab V yang diadakan di pondok pesantren Al-Fadlu. Sebelum proses Muscab V intervensi yang dilakukan DPP sangat jelas dengan menunda serta menunjuk ketua Dewan tanfidz sementara. Sementara itu setelah Muscab V Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal mulai menata lagi dari demokrasi internal melalui muscab tersebut.

Partai Kebangkitan Bangsa sudah melakukan dimensi kesisteman dengan baik, sesuai dengan AD/ART. Beberapa catatan yang pernah dilalui Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal adanya beberapa konflik diantaranya demokrasi internal partai, dimana salah satu kader tidak menerima hasil keputusan bersama dan keluar dari partai. Partai Kebangkitan Bangsa belajar dari permasalahan sebelumnya, sesudah pergantian kepemimpinan partai ini mampu mengembalikan keutuhan partai serta melaksanakan fungsinya dengan baik, belajar dari kesalahan yang telah dilalui.

B. Derajat Penanaman Nilai (*Value Infusion*)

Identitas partai dilandasi oleh ideologi dan platform partai politik, yang berkaitan dengan basis sosial pendukungnya dan identifikasi kader terhadap pola dan arah perjuangan. Menurut, Randall dan Svavand (2002) identitas nilai tidak hanya terlihat pada pola arah kebijakan yang diperjuangkan, melainkan terlihat juga pada basis sosial pendukung.

Berikut mengenai gambaran basis dukungan dan klientisme dalam partai.

1. Basis dukungan partai

Partai Kebangkitan Bangsa Kabupten Kendal memiliki organisasi internal didalamnya yaitu Garda Bangsa, Gemasaba, Perempuan Bangsa. Didalam dukungan partai pasti ada unsur eksternal dan internal yang mampu membantu kegiatan dalam kegiatan, kemenangan dan kesuksesan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal. Hubungan antara organisasi sayapnya dengan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal sangat baik. Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa memberikan dampak positif dimana keberadaan organisasi sayap meringankan beban partai dalam kaderisasi. Sumbangsih juga memberikan dampak pada suara yang diperoleh partai, melalui sosialisasi dan militansi anggota organisasi sayap. Keberadaan organisasi sayap suatu organisasi yang seidiologi dapat menanamkan nilai nilai dan paltform partai.

Apresiasi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal dalam mengelola organisasi sayapnya ialah menjaga organisasi sayap untuk melakukan kegiatan. Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal menindaklanjuti organisasi sayap yang fakum. Seperti Garda Bangsa yang sebelumnya sempat fakum, karena tidak adanya tindak lanjut dari pengurus. Hal ini diungkapkan Dian Alfat selaku ketua dari Garda Bangsa Kabupaten Kendal masa jabatan 2019;

“Garda Bangsa di Kendal awalnya mula kan fakum, kemudian dari Ketua DPC ngobrol ngobrol dengan saya, agar Garda Bangsa bisa dihidupkan kembali dengan saya ketuanya, mas apip sekretarisnya dan kang fakthur bendaharanya” (Dian Alfat, 2 September 2019).

Dengan ketidaklanjutan ketua Garda Bangsa sebelumnya Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal, mencari pengganti untuk menghidupkan organisasi tersebut.

Kemudian, hubungan Partai Kebangkitan Bangsa dengan basis dukungan eksternalnya ialah mayoritas dari Nahdlatul Ulama'. Karena ada hubungan yang erat antara keduanya baik dalam sejarah dan pendirian Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal yang kita lihat, hubungan baik diantara basis dukungannya seperti tokoh kyai yang kuat sebagai penyalur hubungan antara partai dan basis dukungan (Santri/Nahdlatul

Ulama'). Kemudian penguatan pemahaman partai melalui sosialisasi di masyarakat bahwa sejarah hubungan erat Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nahdlatul Ulama'.

Basis dukungan Partai Kebangkitan Bangsa tidak dapat dilepaskan dari unsur eksternal yang sangat melekat didalam partai ini, ialah organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama'. Menurut Afandi (1998) Nahdlatul Ulama' lahir sebagai gerakan kultural yang berdasarkan ajaran ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Organisasi ini didirikan pada tahun 1926 oleh para ulama' tradisional. Disamping itu keterikatan di Nahdlatul Ulama' antara dengan para kyai dan santrinya sangat erat.

Dalam politik bahwa jami'ah Nahdlatul Ulama' adalah jamiah netral. Jami'ah Nahdlatul Ulama' mempunyai hak politik yang diberikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Seperti yang dikatakan ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal KH Ali Nurudin;

“Jami'ah NU itu netral, namun hak politiknya, itu ada di Partai Kebangkitan Bangsa atas instruksi PBNU pusat hingga saat ini” (Ali Nurudin, 12 Agustus 2019).

Terdapat juga tokoh yang memperngaruhi keduanya yaitu ketokohan Abdurahman Wahid yang mampu menjadi Presiden pada tahun 1999. Ketokohan para kyai masih melekat di partai Partai Kebangkitan Bangsa sendiri. Partai

Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal sendiri mempunyai tokoh kharismatik yaitu KH Dimiyati Rois sekarang menjabat sebagai ketua Dewan Syuro 2019-2024 Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau adalah Kyai besar berada di Kabupaten Kendal yang mempunyai pondok pesantren Al Fadlu Kaliwungu. Pengaruh ketokohan ini sangatlah berpengaruh bagi Partai Kebangkitan Bangsa, karena basis dukungan partai mayoritas dari kalangan santri dan masyarakat pedesaan. Ketokohan kharismatik di Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal juga terdapat KH Ali Nurudin sebagai ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal. Beliau adalah selaku pengasuh Pondok Pesantren Jabal Nur Kaliwungu.

Hubungan antara Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal dengan Nahdlatul Ulama' Kabupaten Kendal sangat dekat. Dalam hal kebijakan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal selalu mendengarkan saran saran dari Nahdlatul Ulama', baik saran mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dibuat (baik kebijakan ekonomi, pendidikan dan infrastruktur) maupun saran dalam mencari tokoh pemimpin daerah.

2. Kuatnya Ideologi dan rendahnya klientalisme di partai

Dengan sistem rekrutmen Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal yang mengedepankan visi dan misi partai agar kader bisa satu komando dan selalu berjuang pada asas

perjuangan partai. Berdasarkan kompetensi ideologi, menyebabkan komitmen kader terhadap partai tinggi. Kader kader yang bergabung dalam partai atas kesamaan ideologi serta adanya kesamaan platform dengan partai Kebangkitan Bangsa. Berikut pengaruh klientisme di dalam partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal;

Pertama, penekanan kepada kader kader Partai kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal untuk senantiasa ideologis tetap perpegang teguh dengan syarat konsekuen yang telah disetujui bersama dan tidak bersifat materil seperti yang dikatakan Muhammad Makmun;

“Calon kader partai harus satu visi dengan Partai Kebangkitan Bangsa” (Muhammad Makmun, 2 September 2019).

Artinya bahwa kader-kader akan bergabung dalam partai harus sesuai dengan kesamaan ideologi serta adanya harapan kesamaan *platform* Partai Kebangkitan Bangsa.

Kedua, Partai Kebangkitan Bangsa melaksanakan kegiatan pengkaderan seperti Pelatihan Kepemimpinan Dasar dan Pelatihan Kepemimpinan Menengah dimana materi materi dalam pelatihan tersebut untuk membesarkan nama partai. Seperti yang dikatakan Muhammad Makmun;

“Program-program jelas kita banyak, programnya yaitu Pelatihan Kepemimpinan Dasar dan Pelatihan

Kepemimpinan Menengah. Disitulah kita digembleng tim pemateri terkait bagaimana kita membesarkan partai” (Muhammad Makmun, 2 September 2019).

Tidak hanya pelatihan kepemimpinan tingkat dasar dan menengah penulis juga menemukan kegiatan-kegiatan berupa pendidikan politik yang terlampir di lampiran.

Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal mampu menanamkan nilai nilai perjuangan partai pada kadernya dengan beberapa kegiatan kaderisasi yang dilaksanakan partai, tidak dipungkiri bahwasanya para kader berjuang sesuai dengan visi misi yang mereka bawa. Seperti halnya yang dikatakan Lutfi (2012) keberhasilan suatu partai menanamkan nilai-nilai dan budaya yang jelas kepada anggota akan berimplikasi terhadap komitmen pendukung. Para anggota akan senantiasa berjuang sesuai identitas, ideologi dan platform partai. Implikasi selanjutnya dari penanaman nilai-nilai yang akan berdampak pada sejauh mana cara pandang dan sikap terhadap dirinya dan lingkungan yang ada disekitar. Suatu partai yang dianggap melembaga jika memiliki basis yang loyal dan para pendukung dan dukungan para anggota diberikan bukan untuk atas pertimbangan materil, akan tetapi karena orientasi politiknya sesuai dengan ideologi dan platform partai.

C. Derajat Otonomi

Dalam otonomi ada dua yang penulis pantau yaitu kemandirian pengambilan keputusan yaitu keuangan partai dan kemandirian pengambilan keputusan. Keduanya sangat berhubungan dengan aliran dana dari mana dan apakah ada pengaruh pengambilan keputusan didalam. Menurut Sigit (2010) hal yang terpenting dari dimensi ini adalah: pertama, apakah partai tergantung kepada aktor luar tersebut atau hubungan itu bersifat independen. Kedua, apakah keputusan partai ditentukan oleh aktor luar atau hubungan itu berupa jaringan yang memberi dukungan kepada partai.

1. Keuangan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal

Dalam pendanaan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal masih bergantung dari sumbangan, baik dari pemerintah maupun dari internal partai. Berikut sumber dana partai yang diterima selama ini;

- a. Dana rutin dari APBD Kabupaten Kendal sebesar Rp. 159.770.304, 6 kursi DPRD/tahun
- b. Iuran per anggota legislatif Rp. 3.000.000/bulan

Sementara dalam prosedur AD/ART partai disebutkan pada bab keanggotaan partai pasal 7 bahwa setiap anggota wajib membayar iuran, akan tetapi di Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal tidak terealisasi. Tentunya

pembiayaan partai tergantung pada kader-kader yang mempunyai finansial yang memempuni, seperti kader-kader yang mempunyai jabatan strategis di DPRD, salah satu kader ialah pengusaha. Ketika ada kegiatan atau acara yang membutuhkan dana besar Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal sendiri hanya mengandalkan bantuan dari anggota legislatif dan kader yang mempunyai finansial yang cukup banyak tadi, ketika terjadi kekurangan dana. Ha Kekurangan ini seperti yang dikatakan Muhammad Makmun;

“Kalau keuangan partai iuran yang jelas dari anggota ada, kemudian ada iuran dari anggota legislatif kemudian ada dana dari Kesbangpol, Jadi ketika event besar kalau banyak anggaran ya temen temen iuran” (Muhammad Makmun, 2 September 2019).

Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten belum bisa mandiri dalam pengelolaan uang bahkan terlalu santai dengan keuangan dengan tidak memungut biaya per-anggotanya. Ditakutkan dengan ketergantungan ini mengakibatkan pada otonom/kemandirian partai dalam pengambilan keputusan. Seperti yang dikatakan Lutfi (2012) dalam masalah keuangan partai dapat dijadikan alat donatur-donatur untuk menguasai partai melalui kemampuan finansial. Kemapanan keuangan partai politik dapat dikatakan ketika sebuah partai mampu hidup dan memaksimalkan pendanaan partai melalui iuran anggota, bukan tergantung pada bantuan pemerintah maupun

dari individu atau kelompok-kelompok tertentu baik di internal partai maupun dari luar partai.

2. Kemandirian partai dalam pengambilan keputusan

Seperti yang sudah dipaparkan diatas, bahwa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal dalam setiap pengambilan ada beberapa mekanisme yang harus ditempuh, sesuai prosedur organisasi. Seperti pembahasan pada demokrasi partai diatas tentang pemilihan Mustasyar, ketua Dewan syuro, ketua Dewan Tanfidz. Dalam pemilihan calon bupati atau calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Kendal banyak yang mempertimbangkan dalam menentukan calon calon pemimpin rakyat.

Pemilihan menentukan calon bupati dan calon legislatif harus di musyawarahkan matang matang. Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal harus menyeleksi calon pemimpin tersebut. Penentuan calon legislatif secara umum ditentukan secara musyawarah, kemudian dalam penentuan calon bupati harus koordinasi dahulu ke tingkatan atas dan beberapa tokoh masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Makmun;

“Kalau penentuan caleg dan calon bupati kita bedasarkan banyak hal. Kita membuka ruang, siapa saja yang mau menjadi caleg atau calon bupati asalkan satu visi misi dengan PKB, ketika orang itu satu presepsi dengan PKB ini maka ayok gabung bareng, dalam prosesnya nanti kita

banyak hal. Kita DPC secara kelembagaan akan melakukan musyawarah, kemudian disamping itu kita melakukan konsultasi, kita akan melakukan koordinasi dengan tingkatan dan beberapa tokoh tokoh masyarakat”.

Dalam keputusan yang bersifat urgen seperti pemilihan calon bupati Partai Kebangkitan Bangsa harus mengajukan hasil keputusan ke tingkatan lebih tinggi (DPP atau DPW) dan menerima masukan dari beberapa tokoh. Pengambilan keputusan ini sangat berisiko karena memungkinkan adanya intervensi dari tingkatan atasannya. Pengaruh ketokohan seseorang yang ada didalam tubuh partai dapat saja mengintervensi kebijakan dalam sifat urgent dan politis. Menurut Lutfi (2012) kepentingan kelompok dan individu akan senantiasa bermain dan berupaya untuk meloloskan kepentingannya dengan memanfaatkan jaringan-jaringan tertentu yang memiliki pengaruh didalam partai. seperti yang diungkapkan diatas dalam pemilihan caleg dan calon bupati, menimbang dari beberapa hal.

Hasil wawancara Muhammad Makmun diatas dan hasil dari observasi, dari tingkatan atas baik DPW maupun DPP, tokoh kharismatik dapat saja mengintervensi terkait kebijakan-kebijakan. Dengan pertimbangan-pertimbangan atau masukan-masukan dari mereka ini akan senantiasa menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan.

Dengan demikian, kemandirian Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal dalam pengambilan keputusan masih dengan intervensi eksternal maupun internal. Dimana Partai Kebangkitan Bangsa selalu san sendiri. Perlunya masukan dari pihak pihak eksternal seperti Nahdlatul Ulama'. Sehingga akan mengakibatkan terjadinya intervensi dari internal partai maupun eksternal partai. Seperti yang diatas bahwa pengaruh DPP sangat mutlak dan harus dipatuhi sebagaimana mestinya.

D. Derajat Pengetahuan Publik (*Reification*)

Reification adalah upaya partai untuk mencitrakan dirinya sebaik mungkin di mata publik. Secara konseptual, partai politik yang bisa mencitrakan dengan baik di mata publik, partai itu akan mendapatkan kepercayaan tinggi dari publik. Sebaliknya, jika suatu partai di mata publik memiliki citra yang tidak diinginkan oleh publik, maka kecenderungan untuk diabaikan oleh publik juga akan cukup tinggi. Menurut Lutfi (2012) pada kenyataannya saat ini partai-partai politik berupaya untuk selalu tampil sebagai partai yang berjuang untuk kepentingan masyarakat. Upaya pencitraan partai politik dapat dilakukan melalui proses-proses politik maupun penggunaan simbol-simbol partai di masyarakat. Berikut upaya Partai Kebangkitan Kabupaten Kendal dalam pencitraan di dalam daerah.

1. Kiprah Partai Dalam Politik Lokal

Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal saat ini berhasil mendudukkan kadernya sebanyak 10 (sepuluh) orang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal, memiliki kekuatan besar untuk memperjuangkan kepentingan konstituennya di legislatif. Sebelumnya Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal pada pemilu tahun 2014 hanya berhasil mendudukkan kadernya sebanyak 6 (enam) orang di kursi DPRD Kabupaten Kendal. Jelas periode sekarang menjadi lebih banyak karena kepercayaan kepada partai ini semakin lebih baik. Karena dalam sisi suara publik semakin mempercayakan kader Partai Kebangkitan Bangsa di ranah legislatif Kabupaten Kendal. Akan tetapi pada pemilihan bupati pada tahun 2015 Partai Kebangkitan Bangsa tidak berhasil memenangkan calon wakil bupati.

Kiprah partai ini tidak bisa dilepaskan dari kinerja fraksinya di jajaran legislatif. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berperan penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Disamping itu hadirnya fraksi merupakan tangan kepanjangan partai di legislatif. Sehingga dalam setiap perumusan kebijakan, fraksi senantiasa berkomunikasi dengan pengurus-pengurus mengenai sikap partai dalam suatu kebijakan. Tidak hanya pengurus fraksi Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal mengundang perwakilan masyarakat untuk bisa memberikan saran dan masukan. Seperti halnya yang

dikatakan Muhammad Zaenudin Ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal;

“Kita lakukan diskusi internal fraksi dulu terkait dengan dinamika, masukan, informasi, saran baik dari tokoh, kelembagaan, masyarakat secara umum. Sehingga semua kita agendakan, kita tampung dan kita diskusikan. Semua pasti tidak bisa berjalan bebarengan tentunya ada prioritas, apa? apa? apa? sehingga ini kita inginkan agar secara kualitas nanti kita perjuangkan untuk dapat direalisasikan apa yang dingiingkan masyarakat” (Muhammad Zaenudin, 19 Agustus 2019).

Selain secara kelembagaan melalui fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, hal lain dilakukan oleh partai ini ialah merekrut seseorang yang sudah mempunyai modal sosial dan mempunyai satu visi misi dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Penggunaan media massa dan media daring kunci sebagian dari para calon legislatif. Dalam pembentukan citra di media daring para caleg giat dalam membentuk citranya sendiri sendiri. Media daring adalah alat yang mampu memberika informasi cepat dimana para calon legislatif menggunakan model ini untuk memberikan informasi terkait program programnya tak hanya itu, media daring dimanfaatkan untuk memperoleh suara milenial.

Dengan selalu mengikut sertakan masyarakat dalam pembuatan kebijakan melalui fraksinya di parlemen, menjadi kunci Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal dalam

membangun citranya. Dengan kebijakan yang memihak kepada rakyat, salah satunya kebijakan penolakan terhadap *full days school*, revisi Perda nomor 4 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan, radikalisasi dan implentasi UU Desa. Seperti yang di katakan Zaenudin selaku ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal;

“Kerja nyata hasil kita sangat relevan, sehingga Alhamdulillah dengan perjuangan 2014-2019 kemarin dan ada pemilihan di tahun 2019 kita mendapatkan kepercayaan lebih besar dibanding tahun kemarin karena sedikit banyak peran andil fraksi dalam mewujudkan kebijakan kebijakan yang populis dan berpihak kepada masyarakat” (Muhammad Zaenudin, 19 Agustus 2019).

Dalam keberhasilannya ada kegagalan di Partai ini. Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal belum bisa membawa calonnya menduduki kursi Wakil Bupati pada pilkada 2015. Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal pada masa itu masih dibawah pimpinan cabang yang berbeda. Koalisi tiga partai PDIP, Nasdem, PKB yang digadang gadang mampu memenangkan calonnya Widya – Gus Hilmy kalah telak dengan Mirna – Masrur yang di diusung Hanura, PKS dan Gerindra.

Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal tidak mau terlena dalam kekalahan tersebut. Kekalahan tersebut menjadi acuan untuk merubah kekurangan yang ada di partai.

2. Kiprah Partai di Masyarakat

Untuk dapat menanamkan pengetahuan publik terhadap kinerjanya dengan melalui kiprah partai di masyarakat. Menurut luthfi (2012) kiprah partai di dalam masyarakat adalah dengan melalui kegiatan kegiatan partai secara kelembagaan maupun personal kader partai. Kegiatan kegiatan dimaksud untuk mengenalkan keberadaan partai kepada masyarakat sementara penggunaan simbol-simbol bertujuan untuk memberikan pengetahuan ideologi partai kepada masyarakat.

Upaya Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal ialah mengadakan kegiatan yang islami mengedepankan tradisi partai seperti Mujahadah, pembacaan Sholawat Nariyah dan Musabaqoh kitab Kuning. Seperti yang dikatakan Muhammad Makmun;

“Kita banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti dalam rangka Harlah, ada Musabaqoh kitab kuning, Mujahadah, pembacaan Sholawat Nariyah. Kita selalu melibatkan masyarakat” (Muhammad Makmun, 2 September 2019).

Upaya Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal selanjutnya menurut Muhammad Makmun ialah kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat, dimana kader kader yang ada di Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal untuk bisa turun kejalan dan menyerap aspirasi masyarakat.

"Disamping itu juga misalkan ada kebutuhan masyarakat terkait aspirasi infrastruktur kita juga melalui teman-teman yang di fraksi untuk harus turun ke jalan untuk menyerap aspirasi" (Muhammad Makmun, 2 September 2019).

Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal saat ini berupaya untuk senantiasa melibatkan masyarakat. Secara kelembagaan, partai ini sudah menjalankan dengan baik dalam kegiatan-kegiatan dengan melibatkan masyarakat. Kegiatan tersebut memiliki nilai dalam pemahaman keberadaan partainya, akan tetapi kegiatan tersebut masih menyondong ke salah satu massa masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut juga masih banyak terkendala terkait penerapannya, masih dilakukan dalam waktu kondisional. Kegiatan-kegiatan yang menjadi program Partai harus setiap saat dilaksanakan tidak hanya satu kali atau dua kali akan tetapi partai harus mengupayakan kegiatan terlaksanakan secara rutin dan kegiatan-kegiatan ditambah lagi dengan basis yang lebih luas, karena hadirnya partai ini bukan hanya untuk menyuarakan satu kelompok akan tetapi beberapa kelompok yang membutuhkan kebenaran.

E. Tantangan dan Hambatan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal

Penulis sangat sulit mendapatkan data terkait tantang dan hambatan Partai Kebangkitan Bangsa melalui wawancara pada akhirnya penulis mendapatkan data terkait tantangan kedepan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal tertulis pada Muscab V pada tahun 2018 diantaranya;

1. Tuntutan peningkatan peran kaum muda dan perempuan dalam partai

Peran kaum muda dan perempuan adalah kemestian bagi partai politik yang demokratis. Di banyak negara, promosi kaum muda dan perempuan menjadi bagian dari strategi dasar regenerasi partai, sehingga *survival* partai dapat lebih diukur dari waktu ke waktu. Keterlambatan dalam promosi kaum muda dan perempuan menyimpan bahaya akan terputusnya regenerasi partai dalam kurun waktu tertentu dan menyuburkan oligarki yang secara jelas merusak bangunan organisasi partai.

2. Otonomi dan independensi masyarakat

Dalam pemilu legislative, presiden dan Pilkada di Kabupaten Kendal sebelumnya, berbagai hasil riset dan telah dibuktikan dengan hasil Pemilu 2014 dan Pilkada 2015 menunjukan betapa semakin independennya warga masyarakat Kabupaten Kendal dalam

menentukan politik. Hal ini diidentifikasi bahwa warga masyarakat semakin rasional dan meleknya warga masyarakat Kabupaten Kendal terhadap politik dan pada sisi yang lain mengidentifikasikan semakin merosotnya pengaruh wibawa-wibawa tokoh masyarakat yang menjadi patron politik. Tantangan ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang harus ditangani oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal agar partai bisa m

3. Kompetisi antar partai yang semakin kuat

Secara nasional partai-partai politik dalam pemilu lalu mengembangkan pola persaingan yang sangat berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Terutama menyangkut masalah pengorganisasian partai dan cara merespon masalah-masalah masyarakat. Pada tingkat pengorganisasian beberapa partai mengembangkan manajemen politik dan organisasi yang lebih professional dan modern. Sementara pada tingkat *political appeal*, lebih dari itu partai harus turut hadir dan kader-kadernya bekerja dan memberikan respons terhadap permasalahan dalam masyarakat.

4. Sistem Pemilu langsung

Perubahan sistem pemilu langsung dimana hak suara sepenuhnya diberikan kepada rakyat, menegaskan diperlukannya hubungan yang lebih

personal dan langsung dengan rakyat/pemilih. Baik pemilihan Bupati, Gubernur dan Presiden. Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal harus siap menata dari pelebagaan. Sehingga partai dapat melembaga agar partai bisa tetap terjaga secara utuh di bagian tubuh partai dan selalu mendapat citra yang baik di mata masyarakat.

5. Iuran anggota partai yang belum terealisasi

Dalam iuran Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal seperti yang dijelaskan diatas belum dijalankan sesuai dengan AD/ART tahun 2014. Sehingga perlunya penegasan untuk iuran per anggota bisa dijalankan dan partai dapat lebih mandiri.

6. Pendekatan politik partai yang masih konvensional

Partai yang masih bertumbuh dengan pendekatan konvensional dalam politik. Kampanye misalnya, yang mengandalkan cara yang terbatas, dalam arti kampanye yang cepat berlalu dengan cara kampanye seperti pawai, konvoi, dan konser dangdut. Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal harus mengedepankan kemampuan kader personal partai dalam merespon isu-isu yang berkembang.

7. Penyebaran kader-kader handal yang belum merata

Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal memang sudah memiliki kader-kader yang handal.

Hanya saja kader-kader handal jumlahnya terbatas. Sehingga banyak kader-kader yang handal terkonsentrasi pada daerahnya sendiri. Ketipangan kader handal menghambat pergerakan partai di daerah yang belum ada kader yang bisa diunggulkan, menyebabkan kemunduran pada suatu daerah tertentu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini secara keseluruhan menunjukan Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal kesimpulannya cukup baik. Beberapa ada pula catatan yang harus diperbaiki disisi pelembagaan guna meningkatkan dan menjaga kelembagaan partai. Berikut hasil penelitian pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal.

Pertama, derajat kesisteman Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal dalam sisi keseluruhan menunjukan parameter cukup baik. Seperti dalam demokrasi partai, keutuhan partai dan sistem rekrutmen yang selalu menegedepankan konsituen yang berlaku. Partai Kebangkitan Bangsa bisa dibilang melembaga di segi kesiteman.

Penanaman nilai Partai Kebangkitan Bangsa cukup bagus, dalam basis dukungan yang mempunyai organisasi internal seperti Garda Bangsa, Gemasaba, Perempuan Bangsa. Hubungan dan komunikasi organisasi internal dengan partai baik, bahkan organisasi internal partai yang fakum dapat dijalankan kembali. Tak hanya hubungan dengan organisasi internal Partai Kebangkitan Bangsa juga baik hubungannya dengan basis dukungan dari kaum Nahdlyin. Pengaruh penanaman nilai ini akan bertahan lebih lama karena dalam

pengaruh klientalisme partai berdasarkan ideologi tidak menghendaki hal materil.

Pelaksanaan otonomi keputusan yang menilai apakah partai tergantung kepada aktor luar tersebut atau hubungan itu bersifat independen dan apakah keputusan partai ditentukan oleh aktor luar atau hubungan itu berupa jaringan yang memberi dukungan kepada partai. Terlihat dalam penentuan keputusan Muscab V yang dipengaruhi oleh DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Pengaruh kharismatik juga disini juga bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan partai karena Partai Kebangkitan Bangsa selalu mengedepankan saran dari tokoh kharismatik dan ormas untuk membuat/bertindak dalam kebijakan tertentu. Selain itu keputusan DPC PKB Kabupaten Kendal diselesaikan dengan cara mandiri. Ketika sistem pendanaan yang ada di partai tidak berjalan baik. Sehingga dalam kasus pelaksanaan otonomi keputusan ini akan menguntungkan seseorang yang memberikan materil dan akan mempengaruhi keputusan.

Citra publik Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal dari masa jabatan sebelumnya melaksanakan tugas dengan baik, menjaga perjuangan ideologi. Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal memiliki kegiatan kegiatan yang mampu diterima masyarakat sekitar seperti kegiatan mujahadah, tahlil dan sebagainya. Dalam pembuatan kebijakan partai ini senantiasa melibatkan masyarakat,

sehingga partai akan cepat dipahami perjuangannya dikalangan masyarakat.

Kedua, faktor hambatan dan tantangan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal ada 7 tantangan dan hambatan yang harus di hadapi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal, terkait tuntutan peningkatan peran kaum muda dan perempuan dalam partai, otonomi dan independensi masyarakat, kompetisi antar partai yang semakin kuat, Sistem Pemilu langsung, iuran anggota partai yang belum terealisasi, pendekatan politik partai yang masih konvensional, penyebaran kader-kader handal yang belum merata.

Hasil dari semuanya menunjukan Partai Kebangkitan Bangsa masih berproses membuat demokrasi partai yang bagus, menjaga keutuhan partai, senantiasa bersandar pada konsituen partai. Dengan basis yang jelas partai ini dapat menanamkan simbol-simbol partai ke seluruh masyarakat. Faktor hambatan dari 7 diatas yang penulis soroti ialah ialah bagian dari keuangan partai yang selalu menggantungkan anggota partai yang mempunyai finansial lebih. Harus dibenahi faktor keuangan ini agar partai lebih mandiri dalam keuangan.

B. Saran

Beberapa kekurangan harus dibenahi, seperti pendanaan yang belum baik, masih mengandalkan beberapa kader yang mempunyai finansial untuk dimintai iuran. Terkait kegiatan yang kurang aktif dilakukan kondisional dan tidak terartur. Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal harus melaksanakan keuangan yang baik melalui iuran anggota, sehingga partai tidak tergantung pada kader yang mempunyai finansial lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief & Tjahjani. 1998. *PKB, Parameter Soliditas NU*. Jawa Pos (Dalam Musa Kazhim & Alfian Hamzah).
- Azizah, Tsaniyatul. 2012. *Kuasa Kyai Dalam Pemaknaan Politik Partai Kebangkitan Bangsa di Daerah Istimewa Yogyakarta*. IPPNU Yogyakarta: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia. Vol I, No. 2.
- Budiardjo, Meriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Design Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Choire, Effendy. 2008. *Islam-Nasionalisme UMNO-PKB: Studi Komparasi dan Diplomasi*. Jakarta: Grafika Indah.
- Dokumen Kepengurusan (Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Kendal masa jabatan 2018-2023).
- Efriza. 2012. *Political Explore*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Ekawati, Esty. 2016. *Institusionalisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Pemilihan Umum 2009*. Fisip UTA'45 Jakarta: Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik, Vol, 2 No.1.
- Feith, Herbert. 1962. *The Decline Of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell Univerity Press.
- Hadari, Namawi. 1987. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Infografis Rekapitulasi Pemilu Legislatif 2014 Kabupaten Kendal. diambil dari www.KabariNews.com/?66047 diakses pada 29 Oktober 2019, Pukul 15.40.

Labolo, Muhadam & Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Luthfi, Muhammad. 2012. *Pelembagaan Partai Politik di Tingkat Lokal (studi tentang Pelembagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai Pasca Kekalahan pada Pemilu 2009)*. Tesis Pasca Sarjana Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Gadjah Mada.

Mulyana, Deddy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Musa Kazhim & Alfian Hamzah. 1999. *5 Partai Dalam Timbangan*. Bandung: Pustaka Hidayah.

Natsir, Wahid. 2016. *Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai di Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen*. STISIP Tasikmalaya: Jurnal Politik Profetik, Vol. 04, No. 1.

Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik (Teori dan Praktik di Indonesia)*, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism (IDW).

Porter, Donald J. 2002. *Managing Politik and islam in Indonesia*. London and New York: Routledge Curzon.

Randall, Vicky dan Lars Svasand. 2002. *“Party Institutionalization in New Democracies”* Dalam Jurnal Party Politics, Vol.8 No. 1. London: Sage Publication.

Rekapitulasi Pemilu Legislatif 2009 Kabupaten Kendal.

Rekapitulasi Pemilu Legislatif 2019 Kabupaten Kendal.

Rekapitulasi Pemilu Lelegislatif 9 Mei 2009 KPU RI.

Rekapitulasi Perhitungan Suara legislatif Pemilu 2004 KPU RI.

Rowdotusya'adah. 2018. *Pelebagaan Partai Politik dan Faksi Intra-Partai (Studi Tentang Kemunculan Faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat)*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Surbhakti. Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta, CV.

Wahid, Makmun. 2017. *Penguatan Pelebagaan Partai Politik Melalui Pilkada Serentak 2018: Sebagai Upaya Melahirkan Elit Politik yang Etis*. Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Jambi.

William Crotty dan Ricard. 2015. *Hanbook Partai Politik*. Bandung: Nusa Media.

Y, Hijriah. 2013. *Institusionalisasi Partai NASDEM di Kabupaten Gowa*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik: Universitas Hasanuddin. (Kutipan Meriam belum) dikutip dari Budiarjo 2008:404.

Website:

- _____. 2014. *Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga*. Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam <https://pkb.id/page/ad-art-pkb/>. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2019.
- _____. 2016. *Arsip Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Kendal 2016-2020*. Dalam sippa.ciptakarya.pu.go.id › rpi2jm › 1473237805RPI2JM_2016-2020. Diunduh pada tanggal 22 September 2019.
- _____. 2019. *Sejarah Pendirian Partai Kebangkitan Bangsa*. Dalam <https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/>. Diakses pada tanggal 20 September 2019.
- _____. 2019. *Sejarah Pendirian Partai Kebangkitan Bangsa*. Dalam <https://pkb.id/read/10094/pkb-pemenang-pemilu-di-kabupaten-kendal/>. Diakses pada tanggal 20 September 2019.

LAMPIRAN

1. Foto DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal
2. Kegiatan

Hari / Tanggal : **Sabtu, 2 Juni 2018**

Waktu : 20.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Pondok Pesantren Al Fadllu 2 Srogo, Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Acara : **Musyawarah Cabang V (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal**



FOTO KEGIATAN

Hari / Tanggal : **Minggu, 10 Juni 2018**
Waktu : 15.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Makan Salsabil, Jl. Soekarno – Hatta, Sidorejo,
Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, 51357.
Acara : **Konsolidasi DPC, DPAC dan DPRt Se - Kabupaten Kendal.**



FOTO KEGIATAN

Hari / Tanggal : **Minggu, 11 November 2018**
Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Hotel "Terra Cassa" Jl. Pangeran Diponegoro Km 1 RT 02
RW 01Bandungan
Kabupaten Semarang Telp. 0298-711 111
Acara : **Pembekalan Caleg DPRD Kab. Kendal dari PKB.**





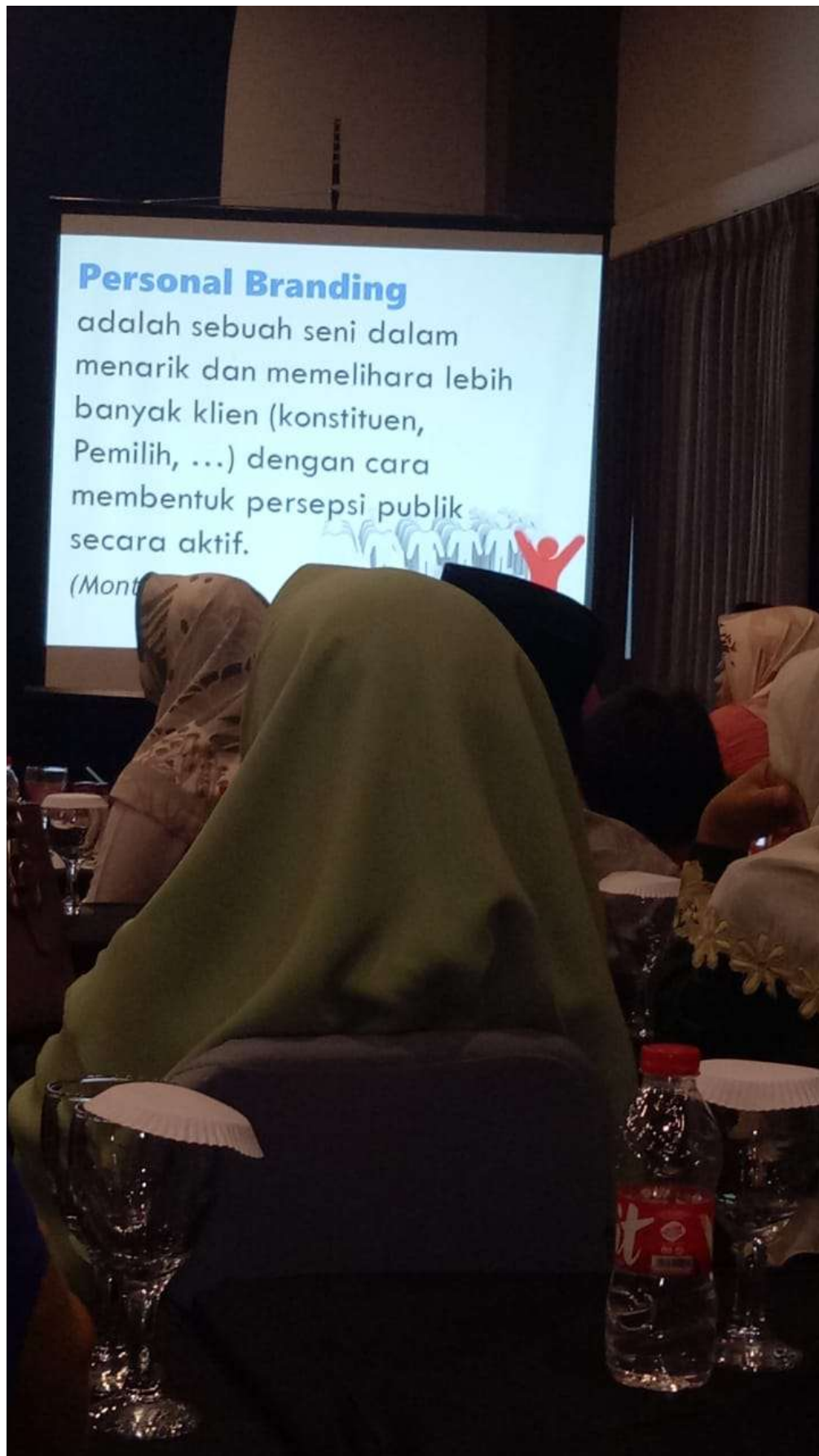




FOTO KEGIATAN

Hari / Tanggal : **Minggu, 18 November 2018**
 Waktu : **10.00 WIB s/d Selesai**
 Tempat : **Kampung Djowo Sekatul Desa Margosari, Kec.**
Limbangan Kab. Kendal,
51383, Telp. 081575044109
 Acara : **Pendidikan Politik dan Konsolidasi.**



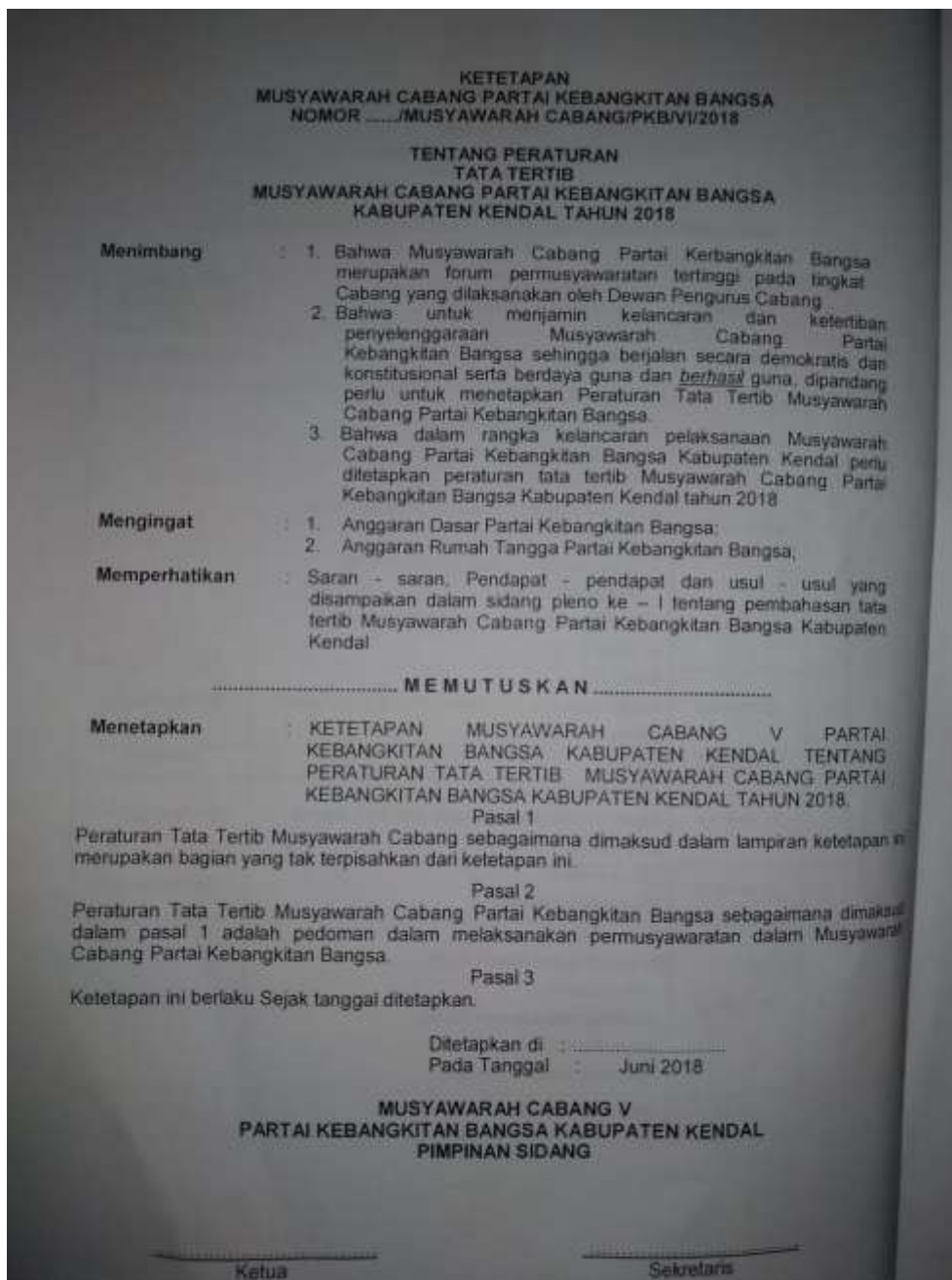


FOTO KEGIATAN

Hari / Tanggal : **Minggu, 2 Desember 2018**
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : **Kantor DPC PKB Kabupaten Kendal**
Acara : Konsolidasi DPC, DPAC dan Caleg DPRD PKB.



Materi Muscab V PKB Kabupaten Kendal 2018



**RANCANGAN PERATURAN TATA TERTIB
MUSYAWARAH CABANG V
DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018**

**BAB I
NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN PENYELENGGARA,
SERTA SAHNYA MUSYAWARAH CABANG**

Pasal 1

Musyawarah ini bernama Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut Musyawarah Cabang.

Pasal 2

Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 2 juni 2018 di Pondok Pesantren Al fadllu 2 Srogo, Sidorejo, Brangsong Kabupaten Kendal Berdasarkan surat ijin penyelenggara Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal dari DPP Nomor : 26466/ DPP-03/VI/B.1/2018 Tertanggal 30 Mei 2018

Pasal 3

Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal dengan membentuk panitia Musyawarah Cabang.

Pasal 4

Musyawarah Cabang dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang Partai yang sah.

Pasal 5

Musyawarah Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Pusat.

**BAB VII
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 6

Musyawarah Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Cabang yang diadakan oleh Dewan Pengurus Cabang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Musyawarah Cabang berwenang

Pasal 7

1. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang;
2. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Cabang untuk 5 (lima) tahun kedepan;
3. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura DPC PKB Kabupaten Kendal;
4. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Kendal
5. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Dewan Syura Dan ketua Dewan Tanfidz terpilih untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai,
6. Menetapkan keputusan-keputusan yang dianggap perlu;
7. Menetapkan tata tertib Musyawarah Cabang

**BAB VIII
PESERTA, HAK SERTA KEWAJIBAN**

Pasal

8.....

Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari : Pasal 8

1. Anggota Dewan Pengurus Cabang , Ketua Biro, Ketua Lembaga, dan Ketua Badan Otonom tingkat Cabang
2. Utusan Dewan Pengurus Anak Cabang yang terdiri dari ketua dan sekretaris Dewan Syura, ketua dan sekretaris Dewan Tanfidz, dan seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus Anak Cabang;

Pasal 9

1. Peserta Musyawarah Cabang Menghadiri Musyawarah Cabang atas undangan dari Dewan Pengurus Cabang;
2. Utusan dari Dewan Pengurus Anak Cabang wajib membawa surat mandat dari Dewan Pengurus Anak Cabang yang bersangkutan.

Pasal 10

Sesuai dengan ketentuan pasal 58 ayat (3) , (4) dan (5) Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Setiap Peserta Musyawarah Cabang mempunyai hak berbicara kecuali diatur dalam tata aturan Muscab ;
2. Setiap Dewan Pengurus Anak Cabang mempunyai 1 (satu) hak suara;
3. Dewan Pengurus Cabang secara kolektif mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 11

Peserta Musyawarah Cabang berkewajiban untuk :

1. Menghadiri semua sidang paripurna/pleno Musyawarah Cabang;
2. Memelihara kelancaran dan ketertiban Musyawarah Cabang;
3. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan tata tertib Musyawarah Cabang ini.

BAB V MATERI MUSYAWARAH CABANG

Pasal 12

1. Materi Musyawarah Cabang terdiri atas :
 - a. Rancangan Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal
2. Materi Musyawarah Cabang dibagikan kepada peserta oleh panitia;

BAB V PERSIDANGAN, PIMPINAN, DAN WEWENANG

Sidang Musyawarah Cabang terdiri dari : Pasal 13

- a. Sidang Pleno / paripurna
- b. Sidang formatur
- c. Sidang khusus yang dibentuk bila mana perlu

Pasal 14

Pemimpin sidang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris

Pasal

15

Tugas dan wewenang pimpinan sidang : Pasal 15

- a. Memimpin sidang
- b. Mengatur lalu lintas pembicaraan dalam persidangan
- c. Menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya persidangan
- d. Menegur dan / atau menghentikan pembicaraan yang menyimpang dari pokok pembicaraan
- e. Mengeluarkan peserta sidang yang dianggap mengganggu ketertiban dan kelancaran jalannya persidangan setelah terlebih dahulu diberi peringatan secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali oleh pemimpin sidang.

BAB VII KETENTUAN SIDANG

Pasal 16

1. Persidangan dalam Musyawarah Cabang pada prinsipnya bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup oleh pimpinan sidang setelah mendapat persetujuan peserta sidang
2. Hasil pembicaraan dalam sidang tertutup hanya boleh diumumkan atas persetujuan sidang
3. Atas usul ketua sidang atau peserta, sidang dapat memutuskan bahwa pembicaraan tertutup yang bersifat rahasia harus dipegang teguh oleh semua peserta, termasuk orang yang karena tugasnya mengetahui materi yang dibicarakan.

Pasal 17

1. Untuk menghadiri sidang, peserta menandatangani daftar hadir dan/ atau menyerahkan kartu tanda hadir pada panitia.
2. Tepat pada waktu yang ditetapkan, ketua sidang membuka sidang, bilamana quorum belum tercapai, ketua sidang menunda sidang selama-lamanya 10 (sepuluh) menit.
4. Setelah sidang ditunda selama 10 (sepuluh) menit, dan ternyata quorum belum tercapai juga, maka sidang dapat dilanjutkan dan keputusan yang dihasilkan adalah sah.

BAB VIII QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 18

1. Setiap sidang harus memenuhi quorum
2. Sidang Musyawarah Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah peserta sidang yang hadir. Sebagaimana pasal 49 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa.

Pasal 19

1. **Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;**
2. Sesuai dengan pasal 60 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, Keputusan Musyawarah Cabang sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua ($1/2$) jumlah peserta yang hadir
3. Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Cabang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis. Sebagaimana pasal 60 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa.

Bab

III.....

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
PROVINSI KABUPATEN KENDAL

Pasal 20

1. Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal disampaikan pada sidang pleno Musyawarah Cabang.
2. Penilaian LPJ Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Kendal disampaikan melalui perwakilan berdasarkan region dalam sidang pleno Musyawarah Cabang.
3. Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal mempunyai hak jawab atas pandangan umum.

BAB IX
TATA CARA PEMILIHAN KETUA

Pasal 21

Setelah laporan pertanggungjawaban Pengurus Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa dinilai dan ditetapkan oleh sidang pleno Musyawarah Cabang, maka Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal dinyatakan demisioner oleh DPP PKB.

Pasal 22

Mekanisme pemilihan Ketua Dewan Syura dan Dewan Tanfidz dilakukan dengan pemilihan **secara Musyawarah Mufakat**.

Pasal 23

Pencalonan dan pemilihan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz DPC Partai kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal Periode 2018-2022 dilaksanakan dalam sidang Pleno Musyawarah Cabang yang dipimpin oleh DPP Partai Kebangkitan Bangsa.

BAB X
PERSYARATAN CALON KETUA

Pasal 24

Calon Ketua Dewan Syura dan calon Ketua Dewan Tanfidz DPC Partai kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal periode 2018-2022 dipilih oleh peserta Musyawarah Cabang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pernah menjadi pengurus DPC atau DPAC Partai kebangkitan Bangsa di Kabupaten Kendal.
- b. Berprestasi, berdedikasi tinggi terhadap organisasi dan berakhlakul karimah.
- c. Memiliki waktu dan loyalitas untuk DPC Partai kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal.
- d. Calon Ketua Dewan Syura menyatakan kesediaan untuk dipilih sebagai Ketua Dewan Syura DPC Partai kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal periode tahun 2018-2022 secara lisan.
- e. Calon Ketua Dewan Tanfidz menyatakan kesediaan untuk dipilih sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC Partai kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal periode tahun 2018-2022 secara lisan.

BAB XI FORMATUR

Pasal 25

1. Formatur berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari :
 - a. Ketua Dewan Syura terpilih sebagai ketua
 - b. Ketua Dewan Tanfidz terpilih sebagai sekretaris
 - c. 3 (tiga) orang yang dipilih secara langsung oleh peserta Musyawarah.
2. Anggota formatur dipilih dan ditetapkan dengan Musyawarah Mufakat.
3. Tugas formatur adalah menyusun Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa selambat-lambatnya 7x24 jam.

BAB XVII PENUTUP

Pasal 26

Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan tata tertib ini akan ditentukan lebih lanjut dalam Musyawarah Cabang.

Ditetapkan : Di
Pada Tanggal : Juni 2018

**MUSYAWARAH CABANG V
DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
KABUPATEN KENDAL
PIMPINAN SIDANG**

.....
Ketua

.....
Sekretaris

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.
Yth. Ibu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara/i:

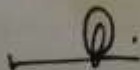
Nama : FACHRI SETIADI
NIM : 1506016014
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Kendal Tahun 2014-2019

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 12 November 2019
Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

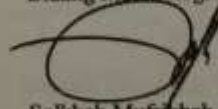


Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag

NIP: 197303142001121001

Tanggal : 20/11/2019

Bidang Metodologi & Tata Tulis



Solkhah Mufrikhah, M.Si

NIP:

Tanggal : 20/11/2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024) 76435986

Nomor : B-511 /Un.10.6/J2/PP.00.9/5/2019

Hal : Penunjukan Pembimbing.

Kepada Yth.

1. Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag

2. Solkhah Mufrikhah, M.Si

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo

Di Semarang.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah mempertimbangkan aspek akademik dan administratif, dengan ini Ketua Jurusan Ilmu Politik menunjuk Bapak/Ibu untuk berkenan menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : FACHRI SETIADI
NIM : 1506016014
Semester : VIII
Judul Skripsi : Pelembagaan PKB di Tingkat Lokal

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang 14 Mei 2019

A.n. Dekan

Ketua Jurusan



Tembusan disampaikan kepada :

1. Dekan FISIP UIN Walisongo
2. Arsip.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Fachri Setiadi
2. Nim : 1506016014
3. Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 4 September 1996
4. Alamat : Desa Gemuhblanten RT 04/RW
01, Kec. Gemuh, Kab. Kendal
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. No. Telp : 081225655479
8. Email : fachrisetiadi@gmail.com
9. Twitter : fachri04ynwa



B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

NO	SEKOLAH	TAHUN LULUS
1	SDN 2 GEMUHBALNTEN	2008
2	SMPN 1 GEMUH	2011
3	SMK N 4 KENDAL	2014

2. Organisasi

- a) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat UIN Walisongo
- b) LPM Reference
- c) Dema FISIP UIN Walisongo 2015
- d) HMJ Ilmu Politik 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang 27 November 2019

Saya yang bersangkutan

Fachri Setiadi

1506016014